DOKUMEN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JL. PAHLAWAN NO.9 TELP. 8311174 (20 SALURAN)
FAX. 8311266
SEMARANG

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2023.

Semarang, November 2022

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

ENDI FAIZ EFFENDI, S.Pi, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 199603 1 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabel..... ii
Lembar Pengesahan.....
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2021..... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018 . 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah..... 53
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda 102
2.4 Reviu terhadap RKPD 104
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH..... 136
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah..... 136
3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah..... 137
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH..... 141
BAB IV PENUTUP..... 199

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapituliasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah……	8
Tabel	2.2	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah ……	25
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah……	54
Tabel	2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023….	105
Tabel	2.5	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah ……	135
Tabel	3.1	Isu-isu Pembangunan Nasional dan Daerah……	137
Tabel	3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023……	139
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah……	142

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mewujudkan visi-misi dan program kerja Gubernur serta manajemen pemerintahan daerah yang efektif, efisien serta akuntabel, maka Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan mengamanatkan Setda untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Tugas dan fungsi Setda tersebut merupakan instrumen sistem pengendalian atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Setda tersebut diatas menuntut sinergitas perencanaan strategis Setda dengan Perangkat Daerah lain selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renja yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta mengacu kepada RKPD serta berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 yang mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023. Renja disusun sebagai pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, disinergikan dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga terkait, antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah. Guna menjamin kesesuaian kinerja program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Sekretariat Daerah dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka dilakukan proses penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 sebagaimana gambar berikut:

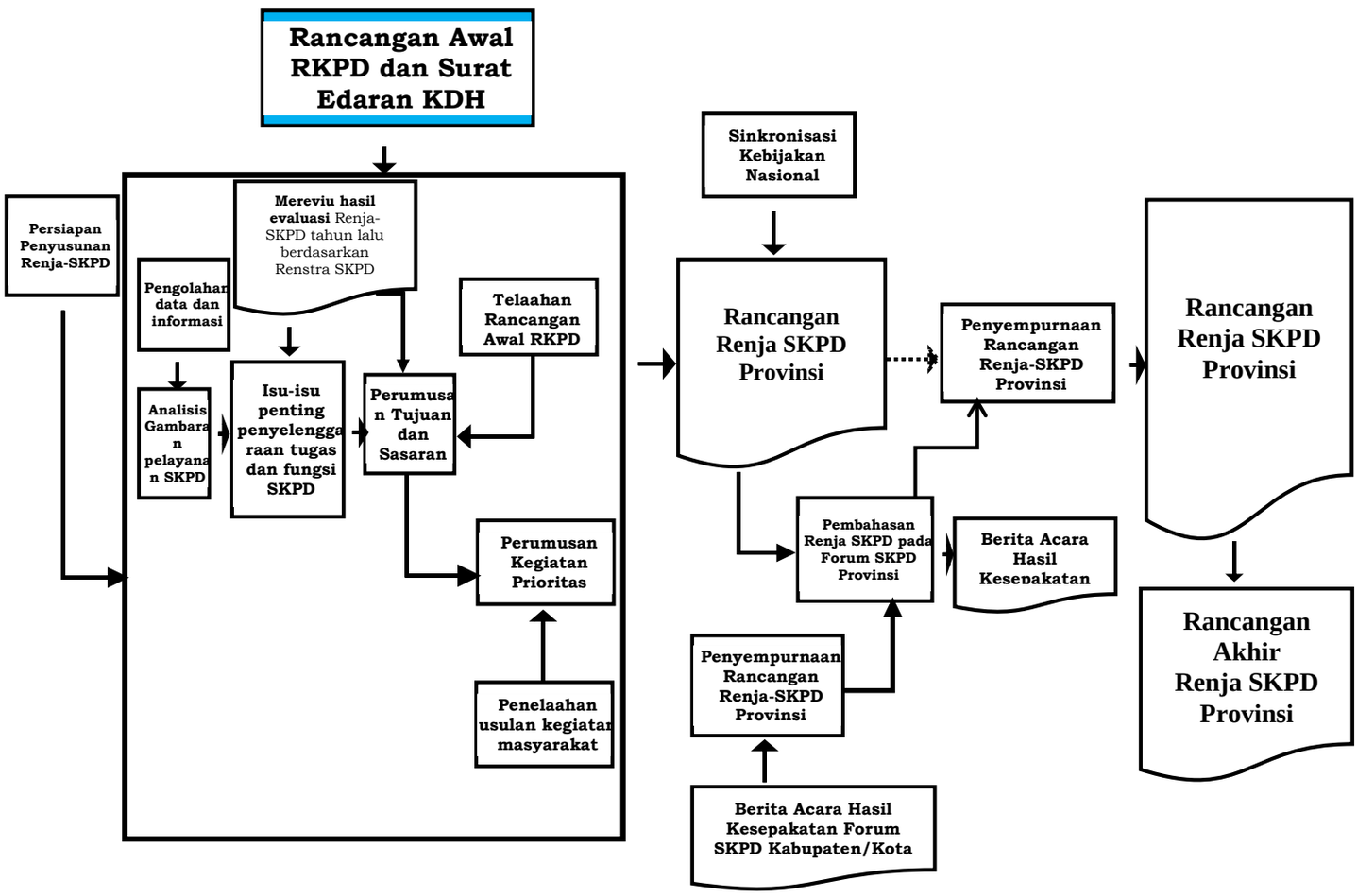

Gambar 1.1
Proses penyusunan dokumen Renja Sekretariat Daerah tahun 2023

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
28. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0002645 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

29. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0017747 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Renha Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah juga dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanakan Program dan Kegiatan tahun berikutnya.
3. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar Biro dalam lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2021

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2018-2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Setda

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Setda

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan 3 program dengan indikator program sejumlah 61 indikator dan 11 kegiatan dengan 140 indikator kegiatan/sub kegiatan. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2021 dan Capaian Renstra Tahun 2013-2018 sebagaimana dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapituliasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Setda s/d Tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							
	Biro Hukum							
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	94	100	93	100,00	107,53
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	94	100	93	100,00	107,53
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	94	100	92	100,00	108,70
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	94	100	92	100,00	108,70
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%	94	100	92	100,00	108,70
		Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	94	100	92	100,00	108,70
1	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah							
		Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	75	31	12	12	100,00
		Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Dokumen	600	1.101	350	602	172,00
		Jumlah produk hukum yang dikaji	Dokumen	15	15	19	22	115,79
		Jumlah produk hukum yang disosialisasi	Dokumen	3	3	4	4	100,00
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	Dokumen	652	361	132	169	128,03
		Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	Dokumen	350	109	70	70	100,00
		Jumlah produk hukum yang didokumentasi	Dokumen	450	184	90	90	100,00
		Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	900	238	200	200	100,00
		Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	Kabupaten/ Kota	35	69	35	35	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	Laporan	5	2	1	0	0,00
		Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN	Perkara	40	29	9	15	166,67
		Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	Dokumen	628	326	128	195	152,34
		Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	Buku	750	476	60	60	100,00
		Penanganan sengketa hukum	Sengketa	20	9	6	6	100,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat							
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	85	90	90,00	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	85	90	90,91	101,01
		Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	85	90	92,31	102,57
		Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	85	90	90,00	100,00
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	85	90	91,67	101,86
2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat							
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	0	1	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan	Dokumen	5	2	1	1	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama	Dokumen	10	4	2	2	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Dokumen	0	1	1	1	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen	1	1	1	1	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan	Dokumen	20	8	4	4	100,00
		Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dokumen	5	2	1	1	100,00
	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama							
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100,00	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	100	100	100	100,00	100,00
	Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah							
		Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah dokumen penegasan batas daerah	Dokumen	10	4	1	1	100,00
		Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	36	108	36	36	100,00
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	Wilayah	36	108	36	36	100,00
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota	Dokumen	73	35	0	0	0,00
		Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota	Dokumen	65	26	13	15	115,38
		Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD	Dokumen	115	26	20	37	185,00
		Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH	Dokumen	58	21	21	23	109,52
		Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	Wilayah	36	108	36	36	100,00
		Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	Dokumen	250	126	25	68	272,00
		Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri	%	100	100	100	100,00	100,00
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN							
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam							
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	85	90	90,00	100,00
		Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	90	100,00	111,11

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	85	90	90,00	100,00
		Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	90	100,00	111,11
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	85	90	90,00	100,00
		Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	90	100,00	111,11
1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian							
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dokumen	13	4	2	2	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Laporan	10	3	2	2	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Laporan	33	8	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	9	2	2	1	50,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan	Dokumen	10	3	1	1	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan	Laporan	14	3	1	1	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan	Laporan	10	3	1	1	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan	Laporan	5	2	1	1	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	5	2	2	2	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral	Laporan	16	5	2	2	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	21	7	2	2	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral	Laporan	5	2	2	2	100,00
2	Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan							
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	15	5	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	15	5	1	1	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Laporan	21	6	1	1	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	20	5	2	2	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	10	3	2	2	100,00
		jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	10	3	1	1	100,00
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah							
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	88	95,24	81	90,48	111,70
		Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	90	84,35	84	86,39	102,85
		Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	85	80,68	81	85,39	105,42
		Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	85	100	85	100,00	117,65
	Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan							
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target	%	85	79,17	83	97,23	117,14
		Persentase pelaksanaan DAK sesuai target	%	86	85,50	86	70,00	81,40
		Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target	%	85	82,70	83	91,52	110,27

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	90	79,46	81	78,57	97,00
		Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	90	88,20	84	75,00	89,29
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu	Laporan	12	24	12	12	100,00
		Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD	Laporan	12	24	12	12	100,00
		Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset	Laporan	5	2	1	1	100,00
		Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur	Dokumen	1	2	1	1	100,00
		Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	90	94,40	87	74,04	85,10
	Biro Perekonomian Daerah							
		Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	97	90	93	93,33	100,35
		Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	98	90	75	93,62	124,83
		Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	95	89	90	92,31	102,57
		Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	92	85	87	100,00	114,94
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	96	85	90	93,75	104,17
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	80	80	80	80,00	100,00
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	93	85	88	89,47	101,67
		Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	90	83	85	100,00	117,65
		Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	90	82	70	89,36	127,66
4	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian							
		jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	Dokumen	20	5	4	4	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	15	4	3	3	100,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	5	3	2	2	100,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	20	5	1	1	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	Dokumen	10	4	2	2	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	20	6	1	2	200,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	Dokumen	15	4	3	3	100,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	Dokumen	15	4	2	2	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	10	3	2	2	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	Dokumen	15	4	1	1	100,00
		Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	Dokumen	25	8	2	3	150,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	5	2	1	1	100,00
		jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	Dokumen	10	3	1	1	100,00
	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa							
		Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	80	73	76	76,00	100,00
		Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	80	73	76	76,00	100,00
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	95	91	92	92,00	100,00
		Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa							
		Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan	%	NA	100	100	100,00	100,00
		Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi	%	NA	100	100	100,00	100,00
		Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa	%	NA	100	100	100,00	100,00
		Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa	%	100	100	100	100,00	100,00
		Jumlah Dokumen SHB dan ASB	Dokumen	NA	3	1	1	100,00
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	NA	100	100	100,00	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah	%	NA	71	72	80,00	111,11
	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM							
	Biro Organisasi							
		Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	48	51,43	31	52,78	170,26
		presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	63	100	51	100,00	196,08
		Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	86	84	85	89,50	105,29
		Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	59,53	34,25	34,59	42,66	123,33
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100	67,99	78,59	79,44	101,08
		Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	100	100	83	100,00	120,48
		Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	97	85	87	82,50	94,83
		Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	85	45	57	88,57	155,39
1	Kegiatan Penataan Organisasi							
		Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan	OPD	48	48	41	41	100,00
		Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	OPD	48	49	41	41	100,00
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00
		jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00
		Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan	Unit	100	205	150	150	100,00
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00
		Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan	Unit	240	512	240	240	100,00
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	OPD	48	48	41	41	100,00
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	OPD	48	48	41	41	100,00
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00
		Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB	OPD	48	48	41	41	100,00
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB	Kabupaten/ Kota	35	35	35	35	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Biro Umum							
		Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah	%	100	100	100	100,00	100,00
		Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	100	100	100,00	100,00
2	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum							
		Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum	Laporan	10	3	1	1	100,00
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	Laporan	20	8	4	4	100,00
		Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas	Laporan	5	3	1	1	100,00
		Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	Laporan	60	24	12	12	100,00
		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Laporan	1	4	3	3	100,00
		Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)	Bulan	12	12	12	12	100,00
3	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan							
		Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan	Laporan	60	24	12	12	100,00
		Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah	Bulan	12	24	12	12	100,00
		Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah	Paket	168	168	144	144	100,00
		Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah	Laporan	6.000	3.103	1.200	1.200	100,00
	NON URUSAN SEKRETARIAT DAERAH							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
	Biro Hukum							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Kesejahteraan Rakyat							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100,00	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah							
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%	85	100	85	100,00	117,65
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. Bangda	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda	Dokumen	6	2	1	1	100,00
		Jumlah laporan evaluasi Setda	Dokumen	5	2	1	1	100,00
2	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Perekonomian Daerah							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro APBJ	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
	Biro Organisasi							
		Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100	100,00	100,00
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan	%	100	100	100	100,00	100,00
1	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
2	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/ Seminar	Orang	200	41	20	22	110,00
	Biro Umum							
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Umum	%	100	100	100	100	100,00
1	Kegiatan Administrasi Keuangan							

No.	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021		
						Target Renja PD Tahun 2021	Realisasi Renja PD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	12	12	12	12	100,00
2	Kegiatan Administrasi Umum							
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan	Unit	25	16	0	0	0,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor	Paket	10	63	20	20	100,00
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	100,00
		Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	Laporan	12	12	12	12	100,00
3	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
		Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan	Set	3.900	1.000	22	22	100,00

a. Evaluasai Capaian Kinerja Program

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat dengan alokasi anggaran Rp.393.023.509.000,-. Program ini memiliki realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,95%. Kinerja program sebanyak 21 indikator seluruhnya tercapai dengan tingkat capaian sangat tinggi. Adapun terhadap target akhir Renstra, seluruh Indikator kinerja program tercapai.

Beberapa capaian kinerja pada program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, antara lain: Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%; Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan dengan realisasi sebesar 100% melebihi dari target 93%; dan Persentase keterlaksanaan kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%.

Pelaksanaan program mengkoordinasikan berbagai dinamika kebijakan/regulasi pusat yang perlu disinergikan dalam pelaksanaanya; menjaga efektivitas proses penyusunan produk hukum daerah ditengah kondisi pandemi Covid-19, dan pengelolaan bantuan hibah bidang keagamaan di Jawa Tengah. Terkait dengan hal tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama meningkatkan pemantauan tertib administrasi pemerintahan dan kerjasama daerah. Biro Hukum melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul produk hukum untuk melakukan percepatan penyusunan dengan menggunakan aplikasi atau media Teknologi Informasi; dan Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk efektivitas layanan bantuan hibah bidang keagamaan. Pelaksanaan program menghasilkan pengelolaan administrasi pemerintahan dan implementasi kerjasama daerah sesuai ketentuan yang berlaku; sinergi rancangan produk hukum daerah Provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum, kesusilaan, tepat waktu, serta tertib administrasi; dan bantuan hibah bidang keagamaan dapat terlaksana dengan baik.

Program Perekonomian dan Pembangunan dilaksanakan oleh Biro Perekonomian, Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, dan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran Rp.87.619.131.000,- Program ini memiliki realisasi fisik sebesar 57,85% dan realisasi keuangan sebesar 52,5%. Kinerja program sebanyak 27 indikator semuanya memiliki capaian sangat tinggi. Adapun terhadap target akhir Renstra, terdapat 14 Indikator tercapai, sedangkan 13 Indikator akan tercapai.

Beberapa capaian kinerja pada program Perekonomian dan Pembangunan, antara lain: persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD dengan realisasi sebesar 93,62% melebihi dari target 75%; persentase hasil ringkas kebijakan bidang ketahanan pangan, kelautan perikanan dan pertanian bidang ketahanan pangan, kelautan perikanan dan pertanian dengan realisasi sebesar 100%; persentase OPD yang pelaksanaan APBD nya sesuai target terealisasi sebesar 86,39% melebihi dari target

84%; dan persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa dengan realisasi sebesar 92% sesuai target.

Pelaksanaan program mengkoordinasikan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah; pelaksanaan PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, yang diprioritaskan untuk pemulihan perekonomian dan kesehatan. Pemulihan perekonomian diantaranya untuk kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Alokasi DBHCHT baru ditetapkan pada Perubahan APBD dan data calon penerima BLT tersedia di bulan Nopember sehingga waktu pelaksanaannya kurang dari 2 bulan; pencapaian target pelaksanaan APBD ditengah situasi pandemi Covid-19; penyesuaian pelaksanaan atas perubahan regulasi terkait Pengadaan Barang/Jasa (proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa baik pada Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen).

Terkait dengan hal tersebut, Biro Perekonomian mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam melakukan koordinasi antar perangkat daerah, verifikasi dan validasi data secara langsung ke kabupaten/kota. Biro Administrasi Pembangunan Daerah mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan agenda-agenda APBD oleh SKPD melalui media daring. Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan sosialisasi regulasi terbaru terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pelaksanaan program menghasilkan harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah relatif stabil; tersalurnya BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi akibat menurunnya Kegiatan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok akibat pandemi Covid 19; agenda pelaksanaan APBD dapat terlaksana sesuai target dan memiliki kualitas pelaksanaan yang baik; dan proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa yang terbaru.

Program Penataan Administrasi Umum dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Biro Umum dengan alokasi anggaran Rp.47.802.643.000,-. Program ini memiliki realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,45%. Program memiliki 12 indikator dan seluruhnya memiliki tingkat capaian sangat tinggi. Adapun terhadap target akhir Renstra, terdapat 9 Indikator tercapai dan 3 Indikator akan tercapai.

Capaian kinerja pada program Penataan Administrasi Umum, antara lain: persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan dengan realisasi sebesar 42,66% melebihi dari target 34,59% dan persentase pemenuhan pelayanan umum dan keuangan Sekretariat Daerah sesuai target dengan realisasi sebesar 100%.

Pandemi covid 19 menimbulkan kendala layanan publik secara langsung kepada masyarakat dan perlunya penyederhaan prosedur layanan peminjman aset oleh Biro Umum. Terkait dengan hal tersebut, Biro Organisiasi mendorong dilaksanakan inovasi layanan secara daring dan fasilitasi survei kepuasan masyarakat. Sedangkan

Biro Umum mengembangkan aplikasi layanan peminjaman aset dan sistem pelayanan kerumahtanggaan Setda. Adapun hasil program Penataan Administrasi Umum yaitu peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Jawa Tengah dan efektivitas pelayanan peminjaman aset dan kerumahtanggaan yang semakin mudah dan cepat.

b. Evaluasi Capaian Target Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

Kegiatan yang mendukung Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah memiliki 17 indikator kinerja, antara lain yaitu 1 dokumen fasilitasi masalah pertanahan/konflik pertanahan dari target 1 dokumen; 15 dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota melebihi dari target 13 dokumen; 23 dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH melebihi dari target 21 dokumen; dan 68 naskah kerjasama dalam negeri melebihi dari target 25 naskah. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah, memiliki 13 indikator kinerja, antara lain yaitu jumlah penyusunan rancangan produk hukum daerah 12 raperda dari target 12 raperda; jumlah rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikaji 169 dokumen melebihi dari target 132 dokumen; jumlah rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota wilayah II yang dikaji 195 dokumen melebihi dari target 128 dokumen; dan jumlah penanganan perkara perdata/TUN 15 perkara melebihi dari target 10 perkara. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat memiliki 25 indikator kinerja, antara lain yaitu pengelolaan sarana dan prasarana spiritual dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen ringkas kebijakan dan 1 dokumen laporan kegiatan sesuai target; fasilitasi kelembagaan bina spiritual dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen ringkas kebijakan dan 5 dokumen laporan kegiatan sesuai target; dan koordinasi dan sinkroniasi kebijakan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dengan capaian kinerja sebanyak 3 dokumen ringkas kebijakan dan 6 dokumen laporan kegiatan sesuai target.

Kendala yang dihadapi antara lain: belum optimalnya pemantauan dan evaluasi tindak lanjut kerjasama daerah; proses penyusunan peraturan dan keputusan Gubernur Jawa Tengah terkendala pada waktu dan tahapan penyusunan rancangan produk hukum daerah karena adanya pandemi Covid-19 dan masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); dan belum optimalnya peran aktif dunia usaha untuk terlibat aktif dalam program pembangunan daerah di Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan antara lain: pemanfaatan serta pengembangan aplikasi SIKEJAM (Sistem Informasi Kerjasama) & SEDUNIA (Sistem Pelayanan Administrasi Perjalanan Luar Negeri); melaksanakan penataan ulang kembali waktu atau jadwal koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah serta meningkatkan penggunaan aplikasi yang mendukung penyusunan produk hukum daerah; dan menumbuhkan semangat kepada dunia usaha agar terus berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui program CSR.

Kegiatan yang mendukung Program Perekonomian Pembangunan sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan Perekonomian memiliki 34 indikator kinerja antara lain yaitu jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perindustrian dan perdagangan dengan keluaran 1 laporan sesuai target, jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang keuangan dengan keluaran 1 dokumen sesuai target, jumlah laporan monitoring bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan keluaran 2 laporan sesuai target dan jumlah laporan monitoring bidang energi sumber daya mineral dengan keluaran 2 laporan sesuai target. Kegiatan Evaluasi Administrasi Pembangunan memiliki 18 indikator kinerja, antara lain: jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD dengan keluaran 12 laporan dari target 12 laporan serta jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan keluaran 2 laporan dari target 2 laporan. Sedangkan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, memiliki 9 indikator kinerja, antara lain yaitu Persentase sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang berjalan optimal dengan keluaran 100% sesuai target dan persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa dengan keluaran 100% sesuai target.

Kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam hal ekspor sumber daya alam di Jawa Tengah, belum optimalnya sinergi dan penggunaan teknologi informasi pada BUMD, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, masih belum optimalnya sarana dan prasarana server *back up* pendukung Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Upaya dilakukan antara lain: pembentukan Tim Koordinasi Peningkatan dan percepatan ekspor pengolahan sumber daya alam Provinsi Jawa Tengah melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 512/27 Tahun 2021, penguatan dukungan IT terhadap pengembangan produk berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan IT serta dukungan teknologi terhadap operasional usaha, menggandeng berbagai instansi terkait untuk menjaga kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, melakukan pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana server *back up* pendukung sistem pengadaan secara elektronik.

Kegiatan yang mendukung Program Penataan Administrasi Umum sebanyak 3 kegiatan. Kegiatan Penataan Organisasi memiliki 14 indikator kinerja, salah satunya yaitu Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan dengan keluaran 41 OPD dari target 41 OPD. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum, memiliki 6 indikator kinerja, salah satunya yaitu jumlah bulan dalam pelayanan rumah tangga pimpinan dengan keluaran 12 bulan dari target 12 bulan. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pimpinan, memiliki 4 indikator kinerja, salah satunya yaitu jumlah publikasi pimpinan daerah dan pembangunan daerah dengan keluaran 144 paket dari target 144 paket. Dalam pelaksanaan kegiatan layanan sambutan oleh Biro Umum, dilakukan pengembangan aplikasi Silabut untuk penyedian materi sambutan yang semakin banyak secara cepat dan berkualitas.

Tabel 2.2
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Provinsi Jawa Tengah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100,00	100,00	60	60
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah oleh Bagian Rumah Tangga	%	100,00	100,00	100	100
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan	%	100,00	100,00	100	100
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adm. Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100,00	100,00	100	100
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100,00	100,00	100	100
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100,00	100,00	100	100
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Dokumen	12	6	4	33,33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun	Dokumen	14	6	4	28,57
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda	Dokumen	8	4	2	25,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanna/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun	Laporan	24	12	9	37,50
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat						
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	Laporan	24	12	9	37,50
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
	Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						
	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	24	12	9	37,50
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	24	4	3	13
	Jumlah Orang Yang di Sosialisas Ketentuan si Bidang Cukai	Orang	16.000	8.000	4.000	25
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0	0	0	0,00
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						
	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan						
	Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT	Dokumen	24	12	9	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Laporan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cuka	Laporan	2	1	0	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Rumah Tangga	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	Dokumen	4	2	1	25,00
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen	4	2	1	25,00
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	Laporan	4	2	1	25,00
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	4	2	1	25,00
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra	Dokumen	8	4	2	25,00
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	2	1	25
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan						
	Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	24	12	9	38
	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	24	12	9	38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah						
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-						
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu						
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	24	12	9	38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro ISDA	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pembangunan Daerah	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada						
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Organisasi	Bulan	24	12	9	38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi	Bulan	24	12	3	13
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Daerah Biro Hukum	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro ISDA	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	8	4	5	63
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel						
	Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	24	12	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin						
	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	24	12	7	29
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya						
	Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	24	12	0	0
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	Laporan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air						
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan						
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	24	12	9	38
	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Bulan	6	3	3	50
	Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Bulan	4	2	2	50
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	12	9	38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel						
	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	24	12	9	38
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	24	12	9	38
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	24	12	9	38
Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	laporan	24	12	9	38
	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	laporan	24	12	9	38

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	Bulan	30	15	10	33
	Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	Unit	30	15	10	33
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala						
	Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur	Bulan	2	1	1	50
	Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur	Bulan	2	1	1	50
Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH	Bulan	24	12	9	37,50
Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						
	Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH	Bulan	24	12	9	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						
	Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						
	Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	24	12	9	37,50
Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan						
	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi						
	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	Bulan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						
	Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	Bulan	24	12	9	37,50
Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan						
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala						
	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH	Bulan	24	12	9	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						
	Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan	Bulan	24	12	9	37,50
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87,8	85	85,36	97,22
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42	85,71	85,71	94
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80	77,14	77,14	96
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	89,47	81,58	81,58	91
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34,15	29,27	29,27	86
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92	91,84	91,84	96
	Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37	73,17	73,17	86
	Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63	73,65	73,65	86
Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	4	2	1	25,00
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	4	2	1	25,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						
	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi	Laporan	16	8	6	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan						
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	16	8	6	37,50
Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	6	3	2	33,33
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	4	2	1	25
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	16	8	6	38
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	4	2	1	25,00
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	4	2	1	25,00
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas						
	Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	152	76	55	36,18
Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						
	Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						
	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	4	2	1	25,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						
	Efektivitas kerjasama daerah	%	95	90	82,17	86,49

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	90	50	55,56
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	90	89,18	93,87
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan	Dok	16	8	4	25,00
Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						
	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ	dok	8	4	1	12,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan						
	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah						
	Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	Laporan	8	4	3	37,50
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah						
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	95	94,87
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	6	3	2	33,33
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	90	106	111,58
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						
	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD	Dokumen	61	32	34	55,74
Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						
	Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	78	39	37	47,44

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah						
	Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	90	75	78,95
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	90	80	84,21
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	90	91,50	96,32
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah						
	Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah	Laporan	26	12	10	38,46
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU	Laporan	2	1	1	50,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta						
	Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Dokumen	25	10	8	32,00
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja						
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Laporan	8	4	3	37,50
	Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	100	100	100
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95	90	70	73,68
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95	90	70	73,68
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42	40	25	59,52
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	4	2	1	25
	Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	6	3	2	33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Kegiatan	6	3	2	33
Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						
	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	20	10	7	35
	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	2	1	1	50
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan						
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	laporan	6	3	2	33
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan						
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	laporan	6	3	2	33
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan						

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	laporan	6	3	2	33
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						
	Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan	dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaa	dokumen	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	laporan	6	3	2	33
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi						
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	laporan	6	3	2	33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	laporan	6	3	2	33
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangan	%	96	95	100	104,17
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	95	100	104,17
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	96	95	100	104,17
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	95	95	100	105,26
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	24	12	9	37,50
	Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	24	12	9	37,50
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	24	12	9	37,50
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	24	12	9	38
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan						
	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	30	15	9	30,00
	Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	laporan	24	12	9	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan						
	Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						
	Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota						
	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	185	90	78	42,16
	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	195	95	104	53,33
	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	195	95	114	58,46
Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum						
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	24	12	9	37,50
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						
	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	400	200	115	29
	Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	20	10	18	90,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						
	Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kab/Kota	70	35	27	38,57

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	sengleta	14	7	5	36
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	80	70	85,37
	persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77	75	70	90,91
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	75	75	93,75
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85	80	92,98	109,39
	Nilai kemandirian BLUD	%	55	50	69,34	126,07
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						
	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	4	2	1	25,00
	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	6	3	2	33,33
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	4	2	1	25,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi						
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro	Laporan	8	4	3	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	8	4	3	37,50
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						
	Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	Dokumen	4	2	2	50,00
	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	Dokumen	4	2	2	50,00
	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	Dokumen	6	3	3	50,00
	Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Dokumen	4	2	2	50,00
	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	4	2	2	50,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						
	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						
	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Laporan	4	2	2	50,00
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Laporan	4	2	2	50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						
	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD	Laporan	8	4	3	38
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD						
	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD	Laporan	4	2	2	50
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90	87	84,84	94,27
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96	95	94,72	98,67
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95	90	91,30	96,11
Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	4	2	1	25
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	4	2	1	25
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	4	3	1	25
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	4	3	1	25
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	6	3	2	33
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	4	2	1	25
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	2	1	25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	4	2	1	25,00
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	8	4	3	37,50
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90	85	60	66,67
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95	93	80	84,21
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	92	90	60	65,22
Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	10	5	3	30,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa	Laporan	8	4	3	37,50
	Jumlah Penyusunan SHB	Laporan	4	2	1	25
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa	Laporan	24	12	9	37,50
	Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	4	2	1	25
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa	Laporan	8	4	3	37,50
Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	6	3	2	33
Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik						
	Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa	Laporan	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang						
	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa	Laporan	24	12	9	37,50
Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	6	3	2	33

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	4	2	1	25
Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ	Laporan	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						
	Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Lapoaran	8	4	3	37,50
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	Capaian Pelaksanaan	%	98,50	98,00	63,20	64,16
	Capaian Pelaksanaan	%	95,50	95,00	60	62,83
	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85,00	80,00	92	108,24
	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85,00	83,00	100	117,14
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100,00	100,00	100	100,00
Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	6	3	2	33
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	6	3	2	33
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	2	0	0
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	16	8	6	37,50
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	16	8	6	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	16	8	6	37,50
Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan						
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	8	4	3	37,50
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah						
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	16	8	6	37,50
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	16	8	6	37,50
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	16	8	6	37,50
Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	8	4	3	37,50
	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	90	88	96	106,26
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan	8	4	3	37,50

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
					Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d TW III Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Sub Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah						
	Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	8	4	3	37,50
Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						
	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	24	12	9	37,50
Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan						
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	8	4	3	37,50

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Tahun 2021. Berikut kinerja pelayanan Sekretariat Daerah tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH												
	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah			%	85,00	85,00	100,00	100,00	85,00	60	100	100	Tetap
	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda			Dokumen	1	1	-	-	1				2020-2021
	Jumlah laporan evaluasi Setda			Dokumen	1	1	-	-	1				2020-2021
	Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD			Dokumen	-	-	6	6	-	4	4	6	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun			Dokumen	-	-	4	5	-	4	4	5	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda			Dokumen	-	-	3	4	-	2	3	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	BIRO ORGANISASI												
	Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian			%	100,00	100,00			100,00				2020-2021
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Laporan	-	-	3	3	-	3	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan			Laporan	-	-	3	3	-	0	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Semina			Orang	8	40	-	-	22				2020-2021
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat			Orang	-	-	30	35	-	3	30	35	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	BIRO HUKUM												
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Laporan	-	-	1	1	-	1	1	1	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Laporan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cuka			Laporan						0	2	0	
	BIRO UMUM												
	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah			%	100,00	100,00	-	-	100,00				2020-2021
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Umum			%	-	100,00	-	-	100,00				Indikator baru di 2021
	Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	100,00	100,00	-	-	90,00				2020-2021
	Persentase layanan liputan dan keprotokolan			%	100,00	100,00	-	-	100,00				2020-2021
	Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga			%	100,00	100,00	-	-	100,00				2020-2021
	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah oleh Bagian Rumah			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase ketercapaian pelayanan penyediaan bahan bacaan dan SPBE oleh Bagian Humas dan Protokol			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase ketercapaian pelayanan surat menyurat oleh Bagian TU dan RT Pimpinan			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase ketercapaian pelayanan pakaian dinas dan medical check up Kepala Daerah dan Wakil oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase ketercapaian pelayanan Kerumahtanggaan Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase layanan materi pimpinan oleh Bagian TU dan RT			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase layanan komunikasi pimpinan Bagian Humas dan Protokol			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase layanan keprotokolan			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			Laporan	12						-	-	2020
	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			Laporan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Penyediaan Gaji dan
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah			Bulan	12	12	12	12	2	9	12	12	Tetap

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor			Paket	17	10	-	-	20		-	-	2020-2021 (Jasa Jaminan Barang Milik Daerah)
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Penyed Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah			Bulan	-	12	12	12	12	9	12	12	2021-2023
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Biro Umum			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	2021
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Biro Umum			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Penyed Alat Tulis
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Penyed Barang
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Rumah Tangga			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah unit penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Setda			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE			Laporan	-	-	4	4	-	5	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan			Unit	11	5	-	-	0		-	-	2020-2021
	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor			Unit	-	10	-	-	10		-	-	Indikator di Sub Kegiatan
	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor			Unit	-	10	-	-	10		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Peng Peralatan Rumah
	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor			Unit	-	10	-	-	10		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Peng peralatan Gedung
	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah unit pengadaan meubelair			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah unit pengadaan Aset tetap			Laporan	-	-	12	12	-	0	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Jasa Peralatan dan Perlengk Kantor)
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Jasa Perbaikan Peralatan Kerja)
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Jasa Kebersihan
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Jasa Jaminan Pemel
	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)			Laporan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan
	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah			Laporan	1	3	-	-	3		-	-	2020-2021
	Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum			Laporan	1	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah			Laporan	4	4	-	-	4		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas			Laporan	-	1	-	-	1		-	-	2021
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah			Laporan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Penyed Jasa Pemel dan Perizinan Kendaraan
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Mobil Jabatan)
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan (Kend
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	3	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Unit Gedung Yang Direhab			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)			Bulan	12	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pengelolaan Urusan
	Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur)			Bulan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pengelolaan Urusan
	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan			Set	50	-	-	-	-		-	-	2020
	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan			Set	-	50	-	-	22		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian
	Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan			Set	-	900	-	-	-		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian
	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur			Laporan	-	-	15	15	-	10	15	15	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur			Laporan	-	-	15	15	-	10	15	15	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur			Bulan	-	-	1	1	-	1	1	1	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil			Bulan	-	-	1	1	-	1	1	1	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah			Laporan	1200	1200	-	-	1200		-	-	2020-2021
	Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan			Paket	168	144	-	-	144		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi materi pimpinan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan Dokumentasi pimpinan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan			Laporan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan			Laporan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan
	Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan			Laporan	-	12	-	-	12		-	-	Indikator di Sub Kegiatan Fasilitasi dan
	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	BIRO ORGANISASI												
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Biro Organisasi			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten			Laporan	-	-	4	4	-	1	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Organisasi			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi			Bulan	12	12	12	12	12	9	12	12	Tetap
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Biro			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan			Laporan	-	-	4	4	-	1	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama			Bulan	12	12	12	12	12	9	12	12	Tetap
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBERDAYA ALAM												
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			Bulan	12	12	-		12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang			Laporan	-	-	4	4	-	1	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Infrastruktur dan SDA			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			Bulan	12	12	12	12	12	3	12	12	Tetap
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian			%	-	-	100	100	-	100,00	100	100	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian			Bulan	12	12	12	12	12	9	12	12	Tetap
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	BIRO HUKUM												
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Daerah Biro Hukum			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro			Bulan	12	12	12	12	12		12	12	Tetap
	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT												
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat			Bulan	12	100	-	-	100		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Kesejahteraan Rakyat			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat			Bulan	12	12	12	12	12	9	12	12	Tetap
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro APBJ			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pengadaan Barang dan Jasa			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan jasa			Bulan	12	12	12	12	12	9	12	12	Tetap
	Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH												
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	
	Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	
	Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pembangunan Daerah			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah			Bulan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan			Bulan	12	12	12	12	12	9	12	12	Tetap
	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah			Bulan	12	12	-	-	12		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	BIRO ORGANISASI												
	Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat			%	85,00	87,00	-	-	82,50		-	-	2020-2021
	Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat			%	-	-	91,84	95,92	-	91,84	91,84	95,92	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat			%	45,00	57,00	-	-	88,57		-	-	2020-2021
	Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat			%	-	-	85,71	91,42	-	85,71	85,71	91,42	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB			%	84,00	85,00	-	-	89,50		-	-	2020-2021
	Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD			%	-	-	85,36	87,80	-	85,36	85,36	87,80	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan			%	67,99	78,59	81,58	89,47	79,44	81,58	81,58	89,47	Tetap
	Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)			%	100,00	83,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase OPD yang nilai SAKIP meningkat			%	-	-	73,17	85,00	-	73,17	73,17	85,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan			%	30,36	34,59	73,65	85,63	42,66	73,65	73,65	85,63	Tetap
	presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15			%	100,00	51,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya			%	-	-	29,27	34,15	-	29,27	29,27	34,15	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15			%	51,43	31,00	-	-	52,78		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya			%	-	-	77,14	80,00	-	77,14	77,14	80,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan			OPD	48	41	-	-	41		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi			Dok	-	-	4	4	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi			Laporan	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB			OPD	48	41	-	-	41		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota			Laporan	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB			OPD	48	41	-	-	41		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD			Dok (Area)	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB			Kabupaten/ Kota	36	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota			Dok (wilayah)	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP			OPD	48	41	-	-	41		-	-	2020-2021
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI			OPD	48	41	-	-	41		-	-	2020-2021
	Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Pemutakhiran Nomenklatur (Kepmen
	Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota			Laporan	-	-	76	76	-	55	76	76	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan			Unit	240	240	-	-	240		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan			Unit	100	150	-	-	150		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama												
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang			%	-	-	90,00	90,00	-	50,00	90,00	90,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase tertib administrasi pemerintahan			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah			%	-	-	90,00	95,00	-	89,18	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Efektivitas kerjasama daerah			%	-	-	90,00	95,00	-	82,17	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen penegasan batas daerah			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ			Dok	-	-	8	8	-	4	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ			Laporan	-	-	4	4	-	4	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH			Dokumen	21	21	-	-	23		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD			Dokumen	5	20	-	-	37		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD			%	-	-	90,00	95,00	-	106,00	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD			Dok	-	-	32,00	29,00	-	34,00	32,00	29,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM			Wilayah	36	36	-	-	36		-	-	2020-2021
	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK			Wilayah	36	36	-	-	36		-	-	2020-2021
	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK			Wilayah	36	36	-	-	36		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan			Dok	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota			Dokumen	13	13	-	-	15		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah Kab/Kota			Dokumen	0	0	-	-	0		-	-	2020-2021
	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			%	-	-	100	100	-	95	100	100	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			Dok	-	-	39	39	-	37	39	39	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah naskah kerjasama dalam negeri			Dokumen	25	-	-	-	-		-	-	2020
	(Antar pemerintah) ;			Dokumen		25	-	-	68		-	-	2021
	(Badan Usaha/ Swasta)			Dokumen		20	-	-	25		-	-	2021
	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti			%	-	-	90,00	95,00	-	30,00	90,00	95,00	Pemutakhiran Nomenklatur (Kepmen 050-3708 / 2020)
	Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah			Laporan	-	-	12	14	-	3	12	14	Pemutakhiran Nomenklatur (Kepmen
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU			Laporan	-	-	1	1	-		1	1	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti			%	-	-	90,00	95,00	-	91,50	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta			Dok	-	-	10	15	-	8	10	15	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan			Dokumen	100	100	-	-	100		-	-	2020-2021
	Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah			%	-	-	90,00	95,00	-	75,00	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang			Laporan	-	-	4	4	-	1	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta			Laporan	-	-	4	4	-	1	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT												
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan			%	100,00	100,00	-	-	50,00		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya			%	85,00	90,00	-	-	90,91		-	-	2020-2021
	Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik			%	-	-	40,00	42,00	-	25,00	40,00	42,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya			%	85,00	90,00	-	-	91,67		-	-	2020-2021
	Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	85,00	90,00	-	-	90,00		-	-	2020-2021
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi			%	85,00	90,00	-	-	92,31		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi			%	85,00	90,00	-	-	90,00		-	-	2020-2021
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar			%	-	-	90,00	95,00	-	70,00	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non			%	-	-	90,00	95,00	-	70,00	90,00	95,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama			Dokumen	2	-	-	-	-		-	-	2020
	(Kelembagaan) ;			Dokumen	-	1	-	-	1		-	-	2021
	(Sarpras)			Dokumen	-	2	-	-	2		-	-	2021
	Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan			Dokumen	4	-	-	-	-		-	-	2020
	(Kelembagaan) ;			Dokumen	-	4	-	-	4		-	-	2021
	(Sarpras)			Dokumen	-	4	-	-	4		-	-	2021
	Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku			Dok	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan			Keg	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pendampingan penyelenggaraan pelayanan haji			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar			Keg	-	-	10	10	-	7	10	10	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji			Keg	-	-	1	1	-	1	1	1	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang			Dok	-	-	3	3	-	1	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Laporan	-	-	3	3	-	0	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang			Dok	-	-	3	3	-	3	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang			Dok	-	-	3	3	-	3	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang			Dok	-	-	3	3	-	3	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Keluarga Berencana			Dok	-	-	3	3	-	3	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Keluarga Berencana			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Dok	-	-	3	3	-	3	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	BIRO HUKUM												
	Persentase efektifitas produk hukum daerah			%	93,00	93,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan			%	93,00	93,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan			%	-	-	95,00	96,00	-	100	95	96	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi			%	-	-	95,00	96,00	-	100	95	96	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum			%	91,00	92,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase kabupaten/kota peduli HAM			%	91,00	92,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun			%	91,00	92,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji			%	91,00	92,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan			%	-	-	95,00	96,00	-	100	95	96	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi			%	-	-	95,00	96,00	-	100	95	96	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah			Raperda	15	15	-	-	12		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Dok	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah			Raperda	-	-	15	15	-	9	15	15	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa			Dokumen	300	350	-	-	602		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur			Dok	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah produk hukum yang			Dokumen	15	19	-	-	22		-	-	2020-2021
	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji			Dokumen	90	132	-	-	169		-	-	2020-2021
	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji			Dokumen	95	128	-	-	169		-	-	2020-2021
	Jumlah produk hukum yang disosialisasi			Dokumen	3	4	-	-	4		-	-	2020-2021
	Jumlah produk hukum yang didokumentasi			Dokumen	90	70	-	-	90		-	-	2020-2021
	Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan			Dokumen	45	90	-	-	70		-	-	2020-2021
	Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi			Buku	60	150	-	-	60		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah dokumen kajian produk hukum			Dok	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I			Dok	-	-	90	95	-	78	90	95	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II			Dok	-	-	95	100	-	104	95	100	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III			Dok	-	-	95	100	-	114	95	100	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK			Laporan	1	1	-	-	0		-	-	2020-2021
	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak			Perkara	48	200	-	-	200		-	-	2020-2021
	Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN			Perkara	12	9	-	-	15		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara			Dok	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu			Perkara	-	-	200	200	-	115	200	200	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara			Perkara	-	-	10	10	-	18	10	10	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM			Kabupaten/ Kota	35	35	-	-	35		-	-	2020-2021
	Penanganan sengketa hukum			Sengketa	5	6	-	-	6		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			Dok	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota			Kab/ Kota	-	-	35	35	-	27	35	35	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			Sengketa	-	-	7	7	-	5	7	7	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBERDAYA ALAM												
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya			%	85,00	90,00	-	-	90,00		-	-	2020-2021
	Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan			%	100,00	90,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur			%	-	-	95,00	96,00	-	92	96	96	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi			%	85,00	90,00	-	-	90,00		-	-	2020-2021
	Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	100,00	90,00	-	-	90,00		-	-	2020-2021
	Presentase capaian kinerja program bidang pertanian			%			87,00	90,00		84,84	90	90	2022-2023
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya			%	85,00	90,00	-	-	90,00		-	-	2020-2021
	Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	100,00	90,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan			%	-	-	82,00	83,00	-	91,30	82	83	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Dokumen	2	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang			Laporan	1	2	-	-	1		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Laporan	1	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Dokumen	2	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Laporan	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman			Laporan	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan			Laporan	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan			Laporan	2	4	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			Dokumen	1	1	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral			Laporan	1	1	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral			Laporan	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan			Dokumen	1	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan			Laporan	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan			Laporan	1	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang			Dok	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DBHCHT			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	BIRO PEREKONOMIAN												

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata			%	80,00	80,00	-	-	80,00		-	-	2020-2021
	Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya			%	90,00	93,00	-	-	93,33		-	-	2020-2021
	Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan			%	85,00	87,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan			%	-	-	80	82	-	70,00	80	82	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM			%	85,00	90,00	-	-	93,75		-	-	2020-2021
	Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya			%	89,00	90,00	-	-	92,31		-	-	2020-2021
	Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	83,00	85,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan			%	-	-	75,00	77,00	-	70,00	75,00	77,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD			%	85,00	88,00	-	-	89,47		-	-	2020-2021
	Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target			%	90,00	75,00	-	-	93,62		-	-	2020-2021
	Persentase tingkat kesehatan BUMD			%	82,00	70,00	-	-	89,36		-	-	2020-2021
	Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan			%	-	-	80,00	85,00	-	92,98	80,00	85,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha			%	-	-	75,00	80,00	-	75,00	75,00	80,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Nilai kemandirian BLUD			%	-	-	50,00	55,00	-	69,34	50,00	55,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang perhubungan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan			Dok	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM			Dokumen	2	3	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM			Dokumen	1	3	-	-	3		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM			Dokumen	1	3	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro			Dok	-	-	0	0	-	1	0	0	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan			Dok	-	-	0	0	-	2	0	0	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan			Dokumen	3	5	-	-	3		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Keuangan			Dokumen	1	4	-	-	4		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan			Dok	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan			Laporan	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi			Dokumen	1	3	-	-	2		-	-	2020-2021
	jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi			Dokumen	1	3	-	-	3		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi			Dokumen	1	2	-	-	2		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka			Dok	-	-	3	3	-	1	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha			Laporan	-	-	4	4	-	1	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha			Dok	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha			Laporan	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT			Dokumen	2	2			2		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD			Dok	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD			Dok	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD			Laporan	-	-	2	2	-	2	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani			%	73,00	76,00			76,00				2020-2021
	Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi			%	-	-	90	92	-	60	90	92	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan			%	73,00	76,00	-	-	76,00				2020-2021
	Efektivitas Pengadaan secara Elektronik			%	-	-	85	90	-	60	85	90	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa			%	91,00	92,00	-	-	92,00		-	-	2020-2021
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa			%	-	-	93	95	-	80	93	95	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa			Laporan	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen SHB dan ASB			Dokumen	2	2	-	-	1		-	-	2020-2021
	Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai			%	71,00	72,00	-	-	80,00		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa			Dok	-	-	5	5	-	3	5	5	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Penyusunan SHB			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa			Laporan	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal			Laporan	-	-	2	2	-	1	2	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan			Laporan	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH												
	Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai			%	84,00	84,00	-	-	86,39		-	-	2020-2021
	Capaian Pelaksanaan APBD			%	-	-	98,00	98,50	-	63,20	98,00	98,50	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu			%	87,00	81,00	-	-	90,48		-	-	2020-2021
	Capaian Pelaksanaan APBN			%	-	-	95,00	95,50	-	60,00	95,00	95,50	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target			%	80,00	81,00	-	-	85,39		-	-	2020-2021
	Persentase realisasi bantuan keuangan			%	-	-	83,00	85,00	-	100,00	83,00	85,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset			%	85,00	85,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah			%	-	-	80,00	85,00	-	100,00	80,00	85,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya			%	100,00	100,00	-	-	100,00		-	-	2020-2021
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi			%	-	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target			%	87,00	84,00	-	-	75,00		-	-	2020-2021
	Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target			%	87,00	81,00	-	-	78,57		-	-	2020-2021
	Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target			%	87,00	87,00	-	-	74,04		-	-	2020-2021
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD			Dok	-	-	3	3	-	2	3	3	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD			Dok			4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Persentase pelaksanaan DAK sesuai target			%	85,00	86,00			70,00				2020-2021
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN			Dok	-	-	4	2	-	0	4	2	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target			%	80,00	83,00	-	-	97,23		-	-	2020-2021
	Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil II yang ditindaklanjuti			%	-		-	-			-	-	2020
	Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target			%	80,00	83,00	-	-	91,52		-	-	2020-2021
	Persentase usulan Pembangunan Kab/Kota Wil I yang ditindaklanjuti			%	-								2020
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I			Dok	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I			Dok	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II			Dok	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II			Dok	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III			Dok	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III			Dok	-	-	8	8	-	6	8	8	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	Target Renstra PD tahun ke-				Capaian Realisasi		Proyeksi		CATATAN ANALISIS
					2020	2021	2022	2023	2021	2022 (TW III)	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD			Laporan	12	12	-	-	12		-	-	
	Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu			Laporan	12	12	-	-	12		-	-	
	Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap			%	-	-	88,00	90,00	-	96,00	88,00	90,00	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah			Dok	-	-	12	12	-	9	12	12	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019
	Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur			Dokumen	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset			Laporan	1	1	-	-	1		-	-	2020-2021
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Dok	-	-	4	4	-	3	4	4	Penyesuaian dengan Permendagri 56 tahun 2019

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda

Memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang dinginkan, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan yang terencana dan mampu menghasilkan kinerja yang sangat baik, berikut isu-isu penting di lingkup Sekretariat Daerah, yaitu:

1). Belum optimalnya Koordinasi perencanaan dan penerapan SPM
2). Belum optimalnya Penyusunan Memori Jabatan Gubernur Jateng Tahun 2023
3). Perlu dilaksanakannya pelantikan 4 Penjabat Kepala Daerah
4). Perlu dilaksanakannya proses PAW Provinsi dan Kabupaten/Kota
5). Perlu peningkatan kualitas pemetaan Potensi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Pemerintahan, Lembaga Dan Swasta
6). Perlu peningkatan kualitas penyusunan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota
7). Perlu peningkatannya kualitas dalam penyusunan LKPJ Gubernur
8). Perlu dilaksanakannya penegasan Batas Daerah
9). Perlu peningkatan harmonisasi, Pembulatan, Pemantapan, Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
10). Belum optimalnya Penanganan Perkara Litigasi di Badan Peradilan, Penanganan Sengketa Hukum Non Litigasi, dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, dan Manajemen Administrasi Perkantoran
11). Perlu peningkatan kualitas kajian, harmonisasi, pembinaan, dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota
12). Belum optimalnya Standar Pelayanan dan Inovasi Pelayanan Publik berbasis Teknologi.
13). Belum optimalnya penyelesaian Proses Bisnis dan Evaluasi SPBE
14). Belum optimalnya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai basis pengembangan karier Pegawai
15). Perlu dilaksanakannya evaluasi dan penyempurnaan indikator kinerja individu sebagai instrumen pemberian tunjangan berbasis kinerja organisasi dan individu.
16). Perlu dilaksanakannya pendampingan penyusunan LKjIP OPD Pemprov Jateng
17). Belum optimalnya penguatan sinergitas tim reformasi birokrasi dan fasilitasi serta pembinaan pelaksanaan RB OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
18). Perlu peningkatan Korporasi Kelembagaan Petani, Peternak dan Nelayan melalui BUMP berbasis Koperasi.

19). Perlu peningkatan pemanfaatan aplikasi panen untuk mendukung Sislogda dalam upaya penguatan database pertanian dan komoditas pertanian.
20). Perlu peningkatan pengembangan Kartu Tani, Kartu Nelayan dan Kartu Ternak
21). Perlu dilaksanakannya Penguatan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian melalui peningkatan dukungan sarpras penyuluhan Pertanian arti luas berbasis teknologi terkini dan IT
22). Perlu peningkatan pengembangan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Sumber Daya Genetik Hewan
23). Perlu peningkatan ketersediaan produksi bibit ternak, tanaman pakan ternak, bahan pakan dan pakan.
24). Perlu peningkatan pembinaan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Zoonosis dan Kesehatan Masyarakat melalui One Health
25). Perlu peningkatan Pembangunan daerah dan pemanfaatan Kawasan hutan guna mendukung ketahanan pangan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan
26). Perlu peningkatan ketersediaan daya listrik, Pengembangan dan Pemanfaatan EBT dalam peningkatan bauran energi serta konservasi energi untuk mendukung pembangunan rendah karbon
27). Belum optimalnya penyediaan akses infrastruktur permukiman dan rumah sehat layak huni
28). Perlu peningkatan pembangunan proyek strategi nasional (PSN) bidang infrastruktur
29). Perlu peningkatan pengembangan SPAM Regional dan peningkatan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di Jawa Tengah
30). Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk pengendalian banjir dan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan.
31). Perlu peningkatan pembinaan dan Pengendalian penyelenggaraan penataan ruang
32). Perlu peningkatan Kualitas Jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor
33). Belum optimalnya pengelolaan dan koordinasi kebijakan BUMD dan BLUD.
34). Belum optimalnya pembinaan mental spiritual.
35). Belum Efektifnya pencapaian urusan bidang Pelayanan Dasar.
36). Belum Efektifnya pencapaian urusan bidang Pelayanan Non Dasar
37). Perlu peningkatan pelayanan administrasi umum Sekretariat Daerah
38). Perlu peningkatan pelayanan administrasi umum pada Pimpinan

2.4 Reviu terhadap RKPD

Mencermati realisasi, tingkat ketercapaian indikator kinerja, kondisi keuangan daerah, kondisi makro ekonomi, dan tantangan berbagai bidang, maka dilakukan reviu terhadap RKPD tahun 2023 yang dituangkan dalam Hasil Analisis Kebutuhan sebagaimana tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA					BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			
I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			3.732.063.000	I	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			3.396.130.000
		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	90%	1.005.000.000			Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	90%	970.790.000
		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95%	1.210.000.000			Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	95%	1.193.890.000
		Efektivitas kerjasama daerah	95%	1.517.063.000			Efektivitas kerjasama daerah	95%	1.231.450.000
1	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			1.005.000.000	1	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			970.790.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	8 Dokumen	1.005.000.000			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	8 Dokumen	970.790.000
	Fasilitasi Penataan Wilayah					Fasilitasi Penataan Wilayah			
		Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	4 laporan	230.000.000			Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	4 laporan	195.790.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum					Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 laporan	225.000.000			Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	4 laporan	225.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan					Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			
		Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ	4 laporan	550.000.000			Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ	4 laporan	550.000.000
2	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.210.000.000	2	Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.193.890.000
		Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	95%	550.000.000			Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	95%	670.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	3 Dokumen	280.000.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	3 Dokumen	223.890.000
		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	380.000.000			Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	300.000.000
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD					Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			
		Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD	29 dokumen	550.000.000			Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD	29 dokumen	670.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan					Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan			
		Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	4 laporan	280.000.000			Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	4 laporan	223.890.000
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			
		Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	39 dokumen	380.000.000			Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	39 dokumen	300.000.000
3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			1.517.063.000	3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			1.231.450.000
		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	95%	697.063.000			Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	95%	571.450.000
		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	95%	290.000.000			Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	95%	250.000.000
		Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	95%	530.000.000			Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	95%	410.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah			697.063.000		Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah			
		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah	14 Laporan	370.000.000			Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah	14 Laporan	261.450.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU	1 Laporan	327.063.000			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU	1 Laporan	310.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta			290.000.000		Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta			
		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	15 Dokumen	290.000.000			Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	15 Dokumen	250.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama			530.000.000		Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama			
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan	4 laporan	170.000.000			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan	4 laporan	130.000.000
		Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	4 laporan	170.000.000			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	4 laporan	130.000.000
		Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	100%	190.000.000			Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	100%	150.000.000
	BIRO HUKUM					BIRO HUKUM			
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			2.720.000.000	II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			3.095.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96%	990.000.000			Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	96%	1.060.000.000
		Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	95%	710.000.000			Persentase rancangan produk hukum yang kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	95%	745.000.000
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	96%	715.000.000			Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	96%	965.000.000
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96%	305.000.000			Persentase kabupaten/kota peduli HAM	96%	325.000.000
1	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			2.720.000.000	1	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			1.805.000.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Dokumen	990.000.000			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Dokumen	523.000.000
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 Dokumen	710.000.000			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	12 Dokumen	110.000.000
		Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 Dokumen	715.000.000			Jumlah dokumen kajian produk hukum	12 Dokumen	427.000.000
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	305.000.000			Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	745.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			525.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			
		Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	350.000.000			Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15 Raperda	345.000.000
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Laporan	175.000.000			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Laporan	178.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			125.000.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			
		Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	12 Laporan	125.000.000			Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	12 Laporan	110.000.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			340.000.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	12 Laporan	140.000.000			Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	12 Laporan	242.000.000
		Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	12 Laporan	200.000.000			Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	12 Laporan	185.000.000
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			710.000.000		Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	95 Dokumen	230.000.000			Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	95 Dokumen	265.000.000
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	100 Dokumen	250.000.000			Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	100 Dokumen	250.000.000
		Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	100 Dokumen	230.000.000			Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	100 Dokumen	230.000.000
2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum			1.020.000.000	2	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum			1.290.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 Dokumen	715.000.000			Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	12 Dokumen	965.000.000
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 Dokumen	305.000.000			Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12 Dokumen	325.000.000
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			715.000.000		Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			
		Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	200 Perkara	250.000.000			Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	200 Perkara	500.000.000
		Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	10 Perkara	465.000.000			Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	10 Perkara	465.000.000
	Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM			305.000.000		Fasilitasi Penyelesaian masalah Non Litigasi dan HAM			
		Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	35 Kab/Kota	130.000.000			Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	35 Kab/Kota	135.000.000
		Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7 Sengketa	175.000.000			Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	7 Sengketa	190.000.000
	BIRO ORGANISASI					BIRO ORGANISASI			
III	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			2.290.000.000	III	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			2.290.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15%	271.550.000			Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	34,15%	271.550.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80,00%	200.150.000			Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	80,00%	200.150.000
		Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,80%	229.550.000			Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	87,80%	229.550.000
		Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92%	186.500.000			Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	95,92%	186.500.000
		Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42%	212.750.000			Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	91,42%	212.750.000
		Persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat	85,37%	362.900.000			Persentase OPD yang nilai SAKIPnya meningkat	85,37%	362.900.000
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	89,47%	420.650.000			Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	89,47%	420.650.000
		Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63%	405.950.000			Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	85,63%	405.950.000
1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			701.250.000	1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			701.250.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	2 Dokumen	271.550.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	2 Dokumen	271.550.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200.150.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	4 Dokumen	200.150.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	2 Dokumen	229.550.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	2 Dokumen	229.550.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi					Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi			
		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi	8 Laporan Hasil Fasilitasi	271.550.000			Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi	8 Laporan Hasil Fasilitasi	271.550.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota					Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	4 Laporan Hasil Fasilitasi	200.150.000			Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	4 Laporan Hasil Fasilitasi	200.150.000
	Penataan Analisis Jabatan					Penataan Analisis Jabatan			
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	8 Laporan Hasil Fasilitasi	229.550.000			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	8 Laporan Hasil Fasilitasi	229.550.000
2	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			1.588.750.000	2	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			1.588.750.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	8 Dokumen (area)	186.500.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	8 Dokumen (area)	186.500.000
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	3 Dokumen (wilayah)	212.750.000			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	3 Dokumen (wilayah)	212.750.000
		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	2 Dokumen	362.900.000			Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	2 Dokumen	362.900.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	2 Dokumen Evaluasi	420.650.000			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	2 Dokumen Evaluasi	420.650.000
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dokumen Evaluasi	405.950.000			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	2 Dokumen Evaluasi	405.950.000
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	4 Laporan Hasil Fasilitasi	186.500.000			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	4 Laporan Hasil Fasilitasi	186.500.000
		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	4 Laporan Hasil Fasilitasi	212.750.000			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	4 Laporan Hasil Fasilitasi	212.750.000
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja					Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			
		Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	76 Laporan	362.900.000			Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	76 Laporan	362.900.000
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan					Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			
		Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	4 Laporan Hasil Fasilitasi	420.650.000			Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	4 Laporan Hasil Fasilitasi	420.650.000
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik					Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	2 Laporan Hasil Fasilitasi	405.950.000			Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	2 Laporan Hasil Fasilitasi	405.950.000
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
IV	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			327.949.109.000	IV	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			350.952.525.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	42%	325.863.110.000			Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	42%	348.615.025.000
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	95%	910.999.000			Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	95%	1.045.000.000
		Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	95%	1.175.000.000			Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	95%	1.292.500.000
1	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			325.863.110.000	1	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
		Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	3 Dokumen	324.813.110.000			Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	3 Dokumen	345.927.150.000
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	3 Dokumen	1.050.000.000			Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	3 Dokumen	2.687.875.000
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			
		Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	3 kegiatan	324.813.110.000			Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	3 kegiatan	345.927.150.000
	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			1.050.000.000		Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual			
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	10 kegiatan	825.000.000			Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	10 kegiatan	1.767.875.000
		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	1 kegiatan	225.000.000			Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	1 kegiatan	920.000.000
2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			910.999.000	2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	4 Dokumen	275.000.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	4 Dokumen	310.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	4 Dokumen	375.000.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	4 Dokumen	415.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	4 Dokumen	260.999.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	4 Dokumen	320.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan					Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 Laporan	275.000.000			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	3 Laporan	310.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan					Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Laporan	375.000.000			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	3 Laporan	415.000.000
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Laporan	260.999.000			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	3 Laporan	320.000.000
3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			1.175.000.000	3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	500.000.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	4 Dokumen	302.500.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	675.000.000			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	990.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	3 Laporan	500.000.000			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	3 Laporan	302.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			675.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3 Laporan	450.000.000			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	3 Laporan	687.500.000
		Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	3 Laporan	225.000.000			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	3 Laporan	302.500.000
V	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			101.395.085.000	V	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4.611.500.000
	BIRO PEREKONOMIAN			1.717.000.000		BIRO PEREKONOMIAN			2.195.000.000
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82%	372.000.000			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	82%	480.000.000
		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	77%	625.000.000			Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	77%	715.000.000
		Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	85%	395.000.000			Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	85%	600.000.000
		Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	80%	250.000.000			Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	80%	300.000.000
		Nilai kemandirian BLUD	55%	75.000.000			Nilai kemandirian BLUD	55%	100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			997.000.000	1	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			997.000.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	2 Dokumen	196.000.000			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	2 Dokumen	260.000.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	2 Dokumen	176.000.000			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	2 Dokumen	220.000.000
		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	2 Dokumen	325.000.000			Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	2 Dokumen	330.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	300.000.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	385.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			372.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro	4 Laporan	196.000.000			Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro	4 Laporan	260.000.000
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan	2 Laporan	176.000.000			Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan	2 Laporan	220.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			625.000.000		Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro	2 Laporan	325.000.000			Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro	2 Laporan	330.000.000
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	3 Laporan	300.000.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	3 Laporan	385.000.000
2	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			720.000.000	2	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			1.000.000.000
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	4 Dokumen	320.000.000			Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	4 Dokumen	450.000.000
		Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	2 Dokumen	75.000.000			Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	2 Dokumen	150.000.000
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	3 Dokumen	150.000.000			Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	3 Dokumen	175.000.000
		Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	2 Dokumen	100.000.000			Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	2 Dokumen	125.000.000
		Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	2 Dokumen	50.000.000			Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	2 Dokumen	50.000.000
		Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD		25.000.000			Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD		50.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
		Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	4 Laporan	320.000.000			Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	4 Laporan	450.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan					Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMD dan Evaluasi Kebijakan			
		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	2 Laporan	75.000.000			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	2 Laporan	150.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			
		Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	4 Laporan	150.000.000			Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	4 Laporan	175.000.000
		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	2 Laporan	100.000.000			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	2 Laporan	125.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			
		Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD	4 Laporan	50.000.000			Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD	4 Laporan	50.000.000
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD					Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD			
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD	2 Laporan	25.000.000			Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD	2 Laporan	50.000.000
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM			99.678.085.000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM			2.416.500.000
		Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	90%	98.430.485.000			Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	90%	905.200.000
		Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	95%	611.300.000			Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	95%	611.300.000
		Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	96%	636.300.000			Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	96%	900.000.000
3	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			99.678.085.000	3	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			2.416.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	3 Dokumen	97.925.285.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	3 Dokumen	400.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	2 Dokumen	252.600.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	2 Dokumen	252.600.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	252.600.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	252.600.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Dokumen	283.800.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2 Dokumen	283.800.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	2 Dokumen	327.500.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	2 Dokumen	327.500.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	2 Dokumen	340.000.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,	2 Dokumen	500.000.000
		Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	296.300.000			Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Dokumen	400.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			98.430.485.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	4 Laporan	265.100.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	4 Laporan	400.000.000
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	2 Laporan	97.660.185.000			Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	2 Laporan	-
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	4 Laporan	252.600.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	4 Laporan	252.600.000
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	252.600.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	4 Laporan	252.600.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			611.300.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Laporan	283.800.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Laporan	283.800.000
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	4 Laporan	327.500.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	4 Laporan	327.500.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			636.300.000		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Laporan	340.000.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4 Laporan	500.000.000
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	296.300.000			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	400.000.000
	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA					BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			
VI	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			4.175.000.000	VI	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			3.578.269.000
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	95%	2.325.000.000			Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	95%	1.934.527.000
		Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	90%	1.030.000.000			Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	90%	920.000.000
		Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	92%	820.000.000			Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	92%	723.742.000
1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			2.325.000.000	1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.934.527.000
		Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	5 Dokumen	2.325.000.000			Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	5 Dokumen	1.934.527.000
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			500.000.000		Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa	4 Laporan	250.000.000			Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa	4 Laporan	250.000.000
		Jumlah Penyusunan SHB	2 Laporan	250.000.000			Jumlah Penyusunan SHB	2 Laporan	150.000.000
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.450.000.000		Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa	12 Laporan	1.100.000.000			Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa	12 Laporan	1.000.000.000
		Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal	2 Laporan	350.000.000			Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal	2 Laporan	219.200.000
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			375.000.000		Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa	4 Laporan	375.000.000			Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa	4 Laporan	315.327.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			1.030.000.000	2	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	3 Dokumen	1.030.000.000			Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	3 Dokumen	920.000.000
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik					Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik			
		Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	12 Laporan	325.000.000			Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	12 Laporan	290.000.000
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa	12 Laporan	505.000.000			Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa	12 Laporan	450.000.000
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa	12 Laporan	200.000.000			Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa	12 Laporan	180.000.000
3	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			820.000.000	3	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	3 Dokumen	820.000.000			Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	3 Dokumen	723.742.000
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa					Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ	4 Laporan	250.000.000			Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ	4 Laporan	225.000.000
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa					Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	2 Laporan	270.000.000			Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	2 Laporan	246.481.000
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa					Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			
		Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	4 Laporan	300.000.000			Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	4 Laporan	252.261.000
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH					BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH			
VII	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			1.785.000.000	VII	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			846.000.000
		Capaian Pelaksanaan APBD	98,5%	360.000.000			Capaian Pelaksanaan APBD	98,5%	-
		Capaian Pelaksanaan APBN	95,5%	300.000.000			Capaian Pelaksanaan APBN	95,5%	-

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase realisasi bantuan keuangan	85%	475.000.000			Persentase realisasi bantuan keuangan	85%	-
		Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	85%	500.000.000			Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	85%	696.000.000
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100%	150.000.000			Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	100%	150.000.000
1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.135.000.000	1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.887.000.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	3 Laporan	100.000.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	3 Laporan	235.500.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	3 Laporan	260.000.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	3 Laporan	402.000.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	2 Laporan	300.000.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	2 Laporan	390.000.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	8 Laporan	158.400.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	8 Laporan	288.400.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	8 Laporan	158.300.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	8 Laporan	288.950.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	8 Laporan	158.300.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	8 Laporan	282.150.000
	Pengendalian Administrasi n Pembangunan APBD			360.000.000		Pengendalian Administrasi n Pembangunan APBD			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	4 Dokumen	100.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	4 Dokumen	235.500.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	4 Dokumen	260.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	4 Dokumen	402.000.000
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN			300.000.000		Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	4 Dokumen	300.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	4 Dokumen	390.000.000
	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah			475.000.000		Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah			
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	8 Laporan	158.400.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	8 Laporan	288.400.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	8 Laporan	158.300.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	8 Laporan	288.950.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	8 Laporan	158.300.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	8 Laporan	282.150.000
1	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			1.000.000.000	1	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			796.000.000
		Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	90%	500.000.000			Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	90%	496.000.000
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	350.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dokumen	200.000.000
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Laporan	150.000.000			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Laporan	100.000.000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			500.000.000		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
		Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	12 Dokumen	500.000.000			Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	12 Dokumen	496.000.000
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			350.000.000		Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	4 Dokumen	350.000.000			Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	4 Dokumen	200.000.000
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			150.000.000		Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen	150.000.000			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen	100.000.000
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			189.597.924.000	VIII	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			189.597.924.000
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH			808.947.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH			808.947.000
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100%	300.000.000			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	100%	250.000.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100%	508.947.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pembangunan Daerah	100%	508.947.000
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			300.000.000	1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
		Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	300.000.000			Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen	250.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun	5 Dokumen	175.000.000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun	5 Dokumen	150.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda	4 Dokumen	125.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda	4 Dokumen	100.000.000
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			508.947.000	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pembangunan Daerah	2 Laporan	508.947.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pembangunan Daerah	2 Laporan	370.006.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah	12 Bulan	58.947.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pembangunan Daerah	12 Bulan	51.006.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pembangunan Daerah	12 Bulan	450.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pembangunan Daerah	12 Bulan	319.000.000
	BIRO ORGANISASI			825.612.000		BIRO ORGANISASI			825.612.000
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100%	505.000.000			Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	100%	505.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100%	320.612.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	100%	320.612.000
1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			505.000.000	1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			505.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	205.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	205.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	300.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 laporan	300.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	35 Orang	75.000.000			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	35 Orang	75.000.000
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian					Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	130.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	130.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya			
		Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	0	-			Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	0	-
	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan					Sosialisasi Peraturan Perundang undangan			
		Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT	12 Laporan	300.000.000			Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT	12 Laporan	300.000.000
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			320.612.000	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			320.612.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	4 Laporan	320.612.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	4 Laporan	320.612.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			63.562.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			63.562.000
		Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Organisasi	12 Bulan	49.500.000			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Organisasi	12 Bulan	49.500.000
		Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi	12 Bulan	14.062.000			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi	12 Bulan	14.062.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			257.050.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			257.050.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	12 Bulan	148.050.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	12 Bulan	148.050.000
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi	12 Bulan	109.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi	12 Bulan	109.000.000
	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			385.000.000		BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA			385.000.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100%	385.000.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	100%	451.076.000
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			385.000.000	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	4 Laporan	385.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	4 Laporan	451.076.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			35.000.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	20.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	48.000.000
		Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	15.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	8.076.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			350.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	250.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12 Bulan	295.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	100.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	100.000.000
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM			369.259.000		BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM			419.439.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Isda dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	100%	369.259.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Isda dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	100%	419.439.000
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			369.259.000	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	4 Laporan	369.259.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	4 Laporan	419.439.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			41.659.000		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Infrastruktur dan SDA	12 Bulan	18.659.000			Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Infrastruktur dan SDA	12 Bulan	18.659.000
		Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	23.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	23.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			327.600.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan SDA	12 Bulan	171.600.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan SDA	12 Bulan	171.600.000
		Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	156.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	12 Bulan	206.180.000
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			350.000.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			540.259.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat		350.000.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat		540.259.000
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.000.000	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			540.259.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	350.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	2 Laporan	540.259.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	70.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	140.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	280.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan	400.259.000
	BIRO HUKUM			350.949.000		BIRO HUKUM			251.707.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum		350.949.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum		251.707.000
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			350.949.000	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			251.707.000
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	2 Laporan	350.949.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	2 Laporan	251.707.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Daerah Biro Hukum	12 Bulan	75.949.000			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Daerah Biro Hukum	12 Bulan	31.707.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	275.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	12 Bulan	220.000.000
	BIRO PEREKONOMIAN			238.675.000		BIRO PEREKONOMIAN			294.980.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian		238.675.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian		294.980.000
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			238.675.000	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	2 Laporan	238.675.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	2 Laporan	294.980.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian	12 Bulan	38.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian	12 Bulan	35.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	12 Bulan	200.675.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	12 Bulan	259.980.000
	BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			437.500.000		BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA			371.731.000
		Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		437.500.000			Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		371.731.000
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			437.500.000	1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	437.500.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	2 Laporan	371.731.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	42.500.000			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	35.233.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	395.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	336.498.000
	BIRO UMUM			185.831.982.000		BIRO UMUM			185.831.982.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	100%	164.596.982.000			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	100%	164.596.982.000
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100.593.880.000	1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	100.593.880.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	92.513.126.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	99.136.898.000			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	91.180.917.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	1.000.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	1.000.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			
		Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 Bulan	356.982.000			Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 Bulan	277.209.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun	12 Bulan	100.000.000			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun	12 Bulan	55.000.000
2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			350.000.000	2	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	350.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	437.500.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	300.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	12 Bulan	375.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
		Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	12 Bulan	50.000.000			Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD	12 Bulan	62.500.000
3	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			40.000.000	3	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	40.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Laporan	20.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
		Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	12 Bulan	40.000.000			Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	12 Bulan	20.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.650.000.000	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Rumah Tangga	12 Laporan	7.650.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Rumah Tangga	12 Laporan	7.564.749.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			350.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
		Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	350.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	402.437.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			500.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12 Bulan	250.000.000			Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	12 Bulan	200.000.000
		Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	250.000.000			Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	300.718.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			250.000.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan	250.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	12 Bulan	425.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			150.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	150.000.000			Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan	120.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			200.000.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			
		Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	200.000.000			Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	12 Bulan	225.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.000.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	5.000.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	4.400.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.200.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum	12 Bulan	1.200.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum	12 Bulan	1.491.594.000
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.550.000.000	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	1.550.000.000			Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	1.200.000.000
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel			
		Jumlah unit pengadaan meubelair	12 Bulan	550.000.000			Jumlah unit pengadaan meubelair	12 Bulan	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	1.000.000.000			Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	1.000.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
		Jumlah unit pengadaan Aset tetap	12 Bulan	-			Jumlah unit pengadaan Aset tetap	12 Bulan	-
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.825.000.000	6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.825.000.000
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5.825.000.000			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	8.138.908.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	250.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	250.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	1.500.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	1.875.000.000
	Pemeliharaan Mebel					Pemeliharaan Mebel			
		Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	75.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	62.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	1.000.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	1.250.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
		Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	12 Bulan	2.500.000.000			Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	12 Bulan	4.288.908.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	500.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala sarana prasarana pendukung gedung kantor	12 Bulan	412.500.000
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			25.225.000.000	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	25.225.000.000			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	22.606.213.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.000.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bulan	7.000.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	12 Bulan	6.200.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.000.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1.000.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	831.213.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			17.225.000.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	17.000.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	15.225.000.000
		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	12 Bulan	150.000.000			Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	12 Bulan	300.000.000
		Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	12 Bulan	75.000.000			Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	12 Bulan	50.000.000
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			23.363.102.000	8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	12 Laporan	23.363.102.000			Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	12 Laporan	25.784.993.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH	12 Bulan	241.829.000			Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH	12 Bulan	241.829.000
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH	12 Bulan	23.121.273.000			Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH	12 Bulan	25.543.164.000
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%	5.005.000.000			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	100%	6.065.000.000
1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			400.000.000	1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	12 Laporan	400.000.000			Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	12 Laporan	210.000.000
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			300.000.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	15 Unit	150.000.000			Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	15 Unit	80.000.000
		Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	15 Unit	150.000.000			Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	15 Unit	80.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100.000.000		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur	1 Bulan	50.000.000			Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur	1 Bulan	25.000.000
		Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur	1 Bulan	50.000.000			Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur	1 Bulan	25.000.000
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75.000.000	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	12 Laporan	75.000.000			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	12 Laporan	30.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan	75.000.000			Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	12 Bulan	30.000.000
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			30.000.000	3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	12 Laporan	30.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	12 Laporan	25.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
		Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum	12 Bulan	30.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum	12 Bulan	25.000.000
4	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.500.000.000	4	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	12 Laporan	2.250.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	12 Laporan	2.950.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	12 Laporan	1.800.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	12 Laporan	1.750.000.000
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Laporan	450.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	12 Laporan	1.100.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
		Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH	12 Bulan	2.250.000.000			Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH	12 Bulan	2.950.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH	12 Bulan	1.800.000.000			Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH	12 Bulan	1.750.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			
		Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	450.000.000			Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	1.100.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%	16.230.000.000			Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	100%	20.366.000.000
1	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			14.600.000.000	1	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan Dokumentasi pimpinan	12 Laporan	14.600.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan Dokumentasi pimpinan	12 Laporan	18.850.000.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			
		Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	12 Bulan	12.400.000.000			Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	12 Bulan	15.750.000.000
	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan					Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			
		Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	12 Bulan	1.800.000.000			Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	12 Bulan	2.800.000.000
	Penyiapan Materi Pimpinan					Penyiapan Materi Pimpinan			
		Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun	12 Bulan	400.000.000			Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun	12 Bulan	300.000.000
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			80.000.000	2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	12 Laporan	80.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	12 Laporan	71.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	50.000.000			Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	12 Bulan	36.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
		Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 Laporan	30.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	4 Laporan	35.000.000
3	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan			1.550.000.000	3	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan			

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Usulan Pagu	No.	Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan (Sub Kegiatan)	Target Kinerja	Pagu Indikatif
			2023	2023				2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	12 Laporan	1.550.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	12 Laporan	1.445.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara					Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan	12 Laporan	1.300.000.000			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan	12 Laporan	1.345.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH	12 Bulan	200.000.000			Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH	12 Bulan	80.000.000
	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan					Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			
		Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan	12 Bulan	50.000.000			Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan	12 Bulan	20.000.000

TABEL 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Guna mewujudkan pencapaian target-target kinerja pembangunan sebagaimana dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dan merespon dinamika situasi global, nasional, dan regional perlu diantisipasi dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Sinergi Renja dengan berbagai situasi dinamis tersebut, diarahkan untuk mencapai Visi RPJMD Tahun 2018-2023, "*Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*" dan Misi Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu:

1) Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran dan Guyup untuk Menjaga NKRI;
2) Mempercepat Reformasi Birokrasi yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3) Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Membuka Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran;
4) Menjadikan Rakyat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya dan Mencintai Lingkungan.

Pada tahun 2023, pandemi covid-19 diprediksi telah menjadi endemi, yang berarti telah dapat dikendalikan. Namun begitu, dampaknya masih perlu mendapat perhatian. Pemerintah Pusat dan Daerah bahu membahu untuk secepatnya melakukan pemulihan keadaan masyarakat di berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kedepan menjadi lebih relevan pada era keterbukaan infomasi seperti saat ini. Selain itu, sebagai kunci dalam memberikan pelayanan prima dan respon cepat terhadap setiap persoalan yang muncul di masyarakat.

Arah kebijakan strategis nasional dan daerah menjadi penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023. Berikut isu strategis nasional dan daerah tahun 2023 yang perlu sinergikan pencapaiannya dalam pelaksanaan agenda Renja Setda tahun 2023.

Tabel 3.1.
Isu-isu Pembangunan Nasional dan Daerah

Indikasi Isu Penting Nasional	Prioritas Strategis Provinsi Jawa Tengah
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; 7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) 3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing 4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.2.1 Tujuan Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Guna memecahkan permasalahan serta menangani berbagai isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, maka ditetapkan dua tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah, yaitu:

1. Meningkatkan Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

3.2.2 Sasaran Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pertama yaitu meningkatkan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki dua sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah.
2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan kedua yaitu meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah memiliki dua sasaran yaitu:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Guna mendukung terciptanya sinergitas pembangunan nasional dan daerah tersebut, Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 akan melaksanakan beberapa program yang mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 memiliki sembilan program, yaitu:

a. Program Administrasi Umum.
b. Program Penataan Organisasi.
c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
d. Program Kesejahteraan Rakyat.
e. Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum.
f. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
g. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa.
h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan.

Adapun perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 beserta targetnya dituangkan dalam tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80,00
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85,00
		Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90,00
			Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45,00
			Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78,00
			Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	95,00
			Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	95,00
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89,00
			Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37
			Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87,76
			Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37
			Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90,00
			Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	%	82,00
			Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90,00
			Ketercapaian Laba BUMD	%	75,00
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Nilai IKM Setda	%	78,50
			Nilai Sakip Setda	%	73,97
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	%	78,50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	%	78,50
			Nilai IKM Biro BUMD	%	78,50
			Nilai IKM Biro Perekonomian	%	78,50
			Nilai IKM Biro Hukum	%	78,50
			Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	%	78,50
			Nilai IKM Biro Pemotdaker	%	78,50
			Nilai IKM Biro Organisasi	%	78,50
			Nilai IKM Layanan Biro Umum dan Administrasi Pimpinan	%	78,50
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini menjelaskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2023 berikut dengan target dan pagu indikatif yang dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju tahun 2024
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah									**200.672.868.000**	**Sekretariat Daerah**	
						Nilai IKM Setda	Angka	78,5			
						Nilai Sakip Setda	Angka	73,97			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								**250.000.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	%	100	250.000.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						250.000.000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	%	100	250.000.000		
		4.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					250.000.000		
						Jumlah pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi PD	Dokumen	6	250.000.000		
		4.01.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.000.000		
						Jumlah dokumen perencanaan Setda yg disusun	Dokumen	8	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja Setda	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								**200.422.868.000**		
						Nilai IKM Biro Administrasi Pembangunan	Angka	78,5	370.006.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						370.006.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%	100	370.006.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					370.006.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Administrasi Pembangunan	Dokumen	2	370.006.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				319.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan	Bulan	12	319.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				51.006.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Administrasi Pembangunan	Bulan	12	51.006.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Hukum	Angka	78,5	601.707.000	Biro Hukum	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						601.707.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%	100	601.707.000		
		4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					350.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	350.000.000		
		4.01.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				350.000.000		
						Jumlah dokumen pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan DBHCHT	Laporan	12	350.000.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					251.707.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Hukum	Dokumen	2	251.707.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum	Bulan	12	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				31.707.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Hukum	Bulan	12	31.707.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Nilai IKM Biro ISDA	Angka	78,5	1.219.439.000	Biro Infrastruktur dan SDA	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						1.219.439.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%	100	1.219.439.000		
		4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					800.000.000		
						Jumlah Orang Yang di Sosialisas Ketentuan si Bidang Cukai	Orang	8000	800.000.000		
		4.01.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				800.000.000		
						Jumlah Laporan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Laporan	1	800.000.000		OPD Provinsi
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					419.439.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro ISDA dan Asisten Ekbang	Laporan	4	419.439.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				377.780.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	12	206.180.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro ISDA	Bulan	12	171.600.000		OPD Provinsi
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				41.659.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Bulan	12	23.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro ISDA	Bulan	12	18.659.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Kesejahteraan Rakyat	Angka	78,5	540.259.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						540.259.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%	100	540.259.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					540.259.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Kesejahteraan Rakyat	Dokumen	2	540.259.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400.259.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	400.259.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				140.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	140.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Organisasi	Angka	78,5	494.300.000	Biro Organisasi	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						494.300.000		
						Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda	%	100	185.000.000		
		4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					185.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	4	185.000.000		
		4.01.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit				
		4.01.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				142.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12	142.000.000		
		4.01.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				43.000.000		
						Jumlah ASN yang mengikuti Diklat	Orang	35	43.000.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	100	309.300.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					309.300.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Laporan	4	309.300.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				249.300.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Administrasi	Bulan	12	75.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Organisasi	Bulan	12	174.300.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				60.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Asisten Administrasi	Bulan	12	20.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Organisasi	Bulan	12	40.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Pemotdaker	Angka	78,5	511.076.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						511.076.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten Pemerintahan	%	100	511.076.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					511.076.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pemotdaker dan Asisten Pemkesra	Dokumen	4	511.076.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				455.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	160.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemotdaker	Bulan	12	295.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				56.076.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bulan	12	8.076.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Pemotdaker	Bulan	12	48.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Angka	78,5	371.731.000	Biro Ad. Pengadaan Baarang/Jasa	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						371.731.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro APBJ	%	100	371.731.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					371.731.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2	371.731.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				336.498.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	12	336.498.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.233.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan	12	35.233.000		OPD Provinsi
						Nilai IKM Biro Perekonomian	Angka	78,5	294.980.000	Biro Perekonomian	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						294.980.000		
						Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Perekonomian	%	100	294.980.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					294.980.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Biro Perekonomian	Laporan	2	294.980.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				259.980.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian	Bulan	12	259.980.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Penatausahaan Arsip Biro Perekonomian	Bulan	12	35.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Nilai IKM Layanan Biro Umum	Angka	78,5	196.019.370.000	Biro Umum	
		4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM						196.019.370.000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	20.366.000.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					71.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian Protokol dan Humas	Laporan	12	71.000.000		
		4.01.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				36.000.000		
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	36.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				35.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	4	35.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					18.850.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi komunikasi dan dokumentasi pimpinan	Laporan	12	18.550.000.000		
		4.01.01.1.13.02			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				15.750.000.000		
						Jumlah Publikasi Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan	Dokumen	12	15.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.13.03			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan				2.800.000.000		
						Jumlah Laporan liputan kegiatan Pimpinan Daerah	Laporan	12	2.800.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksnaan fasilitasi materi pimpinan	Laporan	12	300.000.000		
		4.01.01.1.13.01			Penyiapan Materi Pimpinan				300.000.000		
						Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah yang disusun	Laporan	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan					1.445.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi keprotokolan	Laporan	12	1.445.000.000		
		4.01.01.1.14.01			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara				1.345.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan keprotokolan	Laporan	12	1.345.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.14.02			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				80.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kunjungan tamu KDH dan WKDH	Bulan	12	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.14.03			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan				20.000.000		
						Jumlah bulan pengelolaan hubungan keprotokolan	Bulan	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga	%	100	146.862.157.000		
		4.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					98.886.007.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	98.886.007.000		
		4.01.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				97.503.798.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	97.503.798.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				307.209.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	12	307.209.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.02.07			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				75.000.000		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran PD yang disusun	Laporan	12	75.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					577.500.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	577.500.000		
		4.01.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				375.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	375.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.03.06			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				202.500.000		
						Jumlah laporan penatausahaan aset Perangkat Daerah	Laporan	12	202.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					20.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	12	20.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.04.07			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				20.000.000		
						Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi	Dokumen	12	20.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					7.564.749.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda pada Bagian Rumah Tangga	Laporan	12	7.564.749.000		
		4.01.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				402.437.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	402.437.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				500.718.000		
						Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor	Unit	12	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit penyediaan Perlengkapan Kantor	Unit	12	300.718.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				425.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	425.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				225.000.000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				4.400.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	4.400.000.000		
		4.01.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.491.594.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Umum	Bulan	12	1.491.594.000		
		4.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					5.860.000.000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Laporan	12	5.860.000.000		
		4.01.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				300.000.000		
						Jumlah unit pengadaan meubelair	Unit	12	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.560.000.000		
						Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	12	5.560.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.07.07			Pengadaan Aset Tetap Lainnya				-		
						Jumlah unit pengadaan Aset tetap	Unit	12	-		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					30.000.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah RT Pimpinan	Laporan	12	30.000.000		
		4.01.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				30.000.000		
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	30.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					8.138.908.000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	8.138.908.000		
		4.01.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.875.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	Bulan	12	1.875.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				62.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	62.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.250.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	1.250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				4.288.908.000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	12	4.288.908.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				412.500.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	412.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					25.784.993.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian RT	Laporan	12	25.784.993.000		
		4.01.01.1.11.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				241.829.000		
						Jumlah Bulan Penyediaan gaji dan tunjangan KDH - WKDH	Bulan	12	241.829.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11.04			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				25.543.164.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya dana penunjang operasional KDH-WKDH`	Bulan	12	25.543.164.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	28.791.213.000		
		4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					25.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Setda oleh Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Laporan	12	25.000.000		
		4.01.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				25.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip Biro Umum	Bulan	12	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22.756.213.000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	22.756.213.000		
		4.01.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				6.200.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	6.200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				831.213.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	831.213.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				15.725.000.000		
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	15.225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum	Laporan	2	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	Kegiatan	3	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					210.000.000		
						Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH oleh Bagian TU dan RT Pimpinan	Laporan	12	210.000.000		
		4.01.01.1.11.02			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				160.000.000		
						Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Gubernur	Unit	15	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah unit pakaian dinas dan atribut kelengkapan Wakil Gubernur	Unit	15	80.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.11.03			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Gubernur	Bulan	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah bulan pelayanan kesehatan bagi Wakil Gubernur	Bulan	1	25.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.01.1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					5.800.000.000		
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Gubernur	Laporan	12	2.950.000.000		
		4.01.01.1.12.01			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				2.950.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga KDH	Bulan	12	2.950.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Laporan	12	1.100.000.000		
		4.01.01.1.12.03			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.100.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan	12	1.100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi kerumahtanggaan Wakil Gubernur	Laporan	12	1.750.000.000		
		4.01.01.1.12.02			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.750.000.000		
						Jumlah Bulan pelayanan Rumah Tangga WKDH	Bulan	12	1.750.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
Meningkatnya Efektifitas Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah									**461.170.824.000**		
						Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85			
						Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80			
	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah								**16.620.969.000**		
						Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	89	2.683.000.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						2.683.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Capaian Pelaksanaan APBD	%	98,5	637.500.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					637.500.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	3	402.000.000		
		4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				402.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	402.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	3	235.500.000		
		4.01.08.1.01.01			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD				235.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bidang Pemsosbud yang bersumber dari APBD	Dokumen	4	235.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Capaian Pelaksanaan APBN	%	95,5	390.000.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					390.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	2	390.000.000		
		4.01.08.1.01.02			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN				390.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBN	Dokumen	4	390.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%	85	696.000.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					696.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	200.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.08.1.02.01			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah				200.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi, Analisis dan Evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	4	200.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase OPD dan Kab/Kota yang melaksanakan pelaporan pembangunan daerah secara lengkap	%	90	496.000.000		
		4.01.08.1.02.02			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah				496.000.000		
						Jumlah dokumen Koordinasi dan Fasilitasi pelaporan pembangunan daerah	Dokumen	12	496.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	859.500.000	Biro Adm. Bangda	
		4.01.08.1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah					859.500.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil I	Dokumen	8	288.400.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				288.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil I	Dokumen	8	288.400.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil II	Dokumen	8	288.950.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				288.950.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil II	Dokumen	8	288.950.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wil III	Dokumen	8	282.150.000		
		4.01.08.1.01.03			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah				282.150.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi dan Pengendalian pelaksanaan pembangunan di wil III	Dokumen	8	282.150.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%	100	100.000.000	Biro Adm. Bangda	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.08.1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah					100.000.000		
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Laporan	4	100.000.000		
		4.01.08.1.02.03			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah				100.000.000		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	4	100.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Efektivitas Pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	3.578.269.000	Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa	
		4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						3.578.269.000		
						Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	90	920.000.000	Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa	
		4.01.07.1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					920.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	920.000.000		
		4.01.07.1.02.01			Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik				290.000.000		
						Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	Laporan	12	290.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.02			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				450.000.000		
						Jumlah Fasilitasi sistem informasi pendukung pengadaan barang/jasa	Laporan	12	450.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.02.03			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				180.000.000		
						Jumlah Layanan Pengelolaan Informasi Pengadaan barang/Jasa	Laporan	12	180.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	95	1.934.527.000	Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa	
		4.01.07.1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					1.934.527.000		
						Jumlah Dokumen Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	5	1.934.527.000		
		4.01.07.1.01.01			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				400.000.000		
						Jumlah fasilitasi perencanaan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Penyusunan SHB	Laporan	2	150.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.02			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.219.200.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelayanan pengadaan barang/jasa	Laporan	12	1.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah fasilitasi Pengelolaan e katalog lokal	Laporan	2	219.200.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.01.03			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				315.327.000		
						Jumlah pemantauan dan evaluasi proses pengadaan barang/jasa	Laporan	4	315.327.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Permasalahan Kelembagaan UKPBJ dan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang Terfasilitasi	%	92	723.742.000	Biro Adm. Pengadaan Barang/Jasa	
		4.01.07.1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					723.742.000		
						Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Laporan	3	723.742.000		
		4.01.07.1.03.01			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				225.000.000		
						Jumlah pembinaan SDM Pengadaan barang/jasa Provinsi Jawa Tengah	Laporan	2	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.02			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				246.481.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah fasilitasi kelembagaan UKPBJ	Laporan	4	246.481.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.07.1.03.03			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				252.261.000		
						Jumlah pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang/jasa	Laporan	4	252.261.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Ketercapaian Laba BUMD	%	75	1.850.000.000	Biro Perekonomian	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN						1.850.000.000		
						Nilai kemandirian BLUD	%	55	100.000.000	Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					100.000.000		
						Jumlah Dokumen kajian pengembangan BLUD	Dokumen	2	50.000.000		
		4.01.06.1.03.05			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BLUDdanEvaluasiKebijakan				50.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan BLUD	Laporan	2	50.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BLUD	Dokumen	2	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.03.04			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah				50.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan BLUD	Laporan	4	50.000.000		OPD Provinsi
						Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%	80	300.000.000	Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					300.000.000		
						Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Dokumen	2	125.000.000		
		4.01.06.1.03.02			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				125.000.000		
						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Aneka Usaha	Laporan	2	125.000.000		OPD Provinsi
						Jumlah Dokumen komitmen hasil evaluasi BUMD Aneka Usaha	Dokumen	3	175.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.03.02			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi				175.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha	Laporan	4	175.000.000		OPD Provinsi
						Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%	85	1.450.000.000	Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD					1.450.000.000		
						Jumlah dokumen kajian pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Dokumen	2	150.000.000		
		4.01.06.1.03.03			Koordinasi, Sinkronisasi Pendirian BUMDdanEvaluasiKebijakan				150.000.000		
						Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengembangan BUMD bidang Jasa Keuangan	Laporan	2	150.000.000		OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
							Dokumen	4	1.300.000.000		
		4.01.06.1.03.01			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1.300.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Monev Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan	Laporan	4	1.300.000.000		OPD Provinsi
						Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	90	2.337.500.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						2.337.500.000		
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%	95	1.045.000.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar					1.045.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan	Dokumen	3	415.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.04.1.02.02			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan				415.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Laporan	3	415.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan	Dokumen	3	310.000.000		
		4.01.04.1.02.01			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan				310.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Laporan	3	310.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial	Dokumen	3	320.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.04.1.02.03			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				320.000.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Laporan	3	320.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%	95	1.292.500.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar					1.292.500.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Dokumen	3	302.500.000		
		4.01.04.1.03.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata				302.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan	Laporan	3	302.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Dokumen	3	687.500.000		
		4.01.04.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian				687.500.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga	Laporan	3	687.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksnaan kebijakan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan adminitrasi kependudukan	Dokumen	4	302.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.04.1.03.02			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja				302.500.000		
						Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Administrasi Kependudukan	Laporan	3	302.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	82	3.916.500.000	Biro Infrastruktur dan SDA	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDA NPEMBANGUNAN						3.916.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%	96	900.000.000	Biro Infrastruktur dan SDA	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					900.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen	2	500.000.000		
		4.01.06.1.02.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				500.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Laporan	4	500.000.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dokumen	2	400.000.000		
		4.01.06.1.02.03			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				400.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Laporan	4	400.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%	95	611.300.000	Biro Infrastruktur dan SDA	
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					611.300.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang ESDM	Dokumen	2	302.500.000		
		4.01.06.1.02.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				302.500.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ESDM	Laporan	4	302.500.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dokumen	2	308.800.000		
		4.01.06.1.02.02			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				308.800.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Laporan	4	308.800.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%	90	2.405.200.000	Biro Infrastruktur dan SDA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam					2.405.200.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan dan Perikanan	Dokumen	2	252.600.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				252.600.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kelautan dan Perikanan	Laporan	4	252.600.000		OPD Provinsi
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan	Dokumen	2	252.600.000		
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				252.600.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Laporan	4	252.600.000		OPD Provinsi
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian	Dokumen	3	1.900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.02.01			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				1.900.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan DBHCHT	Laporan	2	1.500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian	Laporan	4	400.000.000		
						Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke atas	%	87,76	391.000.000	Biro Organisasi	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						391.000.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%	91,42	226.157.000	Biro Organisasi	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					226.157.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota	Dokumen	3	226.157.000		
		4.01.02.1.02.01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				226.157.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota	Laporan	4	226.157.000		
						Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%	95,92	164.843.000	Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					164.843.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Dokumen	8	164.843.000		
		4.01.02.1.02.01			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				164.843.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di OPD	Laporan	4	164.843.000		
						Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	85,37	1.164.000.000	Biro Organisasi	
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						1.164.000.000		
						Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	100	412.000.000	Biro Organisasi	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					412.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	2	412.000.000		
		4.01.02.1.02.04			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan				412.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Tatalaksana Pemerintahan	Laporan	4	412.000.000		
						Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%	85,37	355.000.000	Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					355.000.000		
						Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Dokumen	2	355.000.000		
		4.01.02.1.02.02			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				355.000.000		
						Jumlah laporan hasil monev AKIP OPD dan Kab/Kota	Laporan	76	355.000.000		
						Persentase UPP yang mengimplementasikan Standar Pelayanan	%	85,63	397.000.000	Biro Organisasi	
		4.01.02.1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja					397.000.000		
						Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Dokumen	2	397.000.000		
		4.01.02.1.02.05			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				397.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Laporan	2	397.000.000		
						Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%	85,37	700.700.000	Biro Organisasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						700.700.000		
						Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan OPD	%	87,8	229.550.000		
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					229.550.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen	2	229.550.000		
		4.01.02.1.01.03			Penataan Analisis Jabatan				229.550.000		
						Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Analisis Jabatan OPD dan kab/kota	Laporan	8	229.550.000		
						Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	80	200.150.000	Biro Organisasi	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					200.150.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Dokumen	4	200.150.000		
		4.01.02.1.01.02			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				200.150.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Pembinaan Kematangan Organisasi di Kabupaten/Kota	Laporan	4	200.150.000		
						Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	34,15	271.000.000	Biro Organisasi	
		4.01.02.1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan					271.000.000		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen	2	271.000.000		
		4.01.02.1.01.01			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi				271.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Provinsi	Laporan	8	271.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
	Meningkatnya Sinergi Kebijakan Daerah								**444.549.855.000**		
						Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	78	1.195.000.000	Biro Perekonomian	
		4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIANDA NPEMBANGUNAN						1.195.000.000		
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	82	480.000.000	Biro Perekonomian	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					480.000.000		
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Bidang Perhubungan	Dokumen	2	220.000.000		
		4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				220.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Perhubungan	Laporan	4	220.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Dokumen	2	260.000.000		
		4.01.06.1.01.01			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				260.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Makro	Laporan	4	260.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	77	715.000.000	Biro Perekonomian	
		4.01.06.1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					715.000.000		
						jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi mikro	Dokumen	2	330.000.000		
		4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				330.000.000		
						Jumlah Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Ekonomi Mikro	Laporan	4	330.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	3	385.000.000		
		4.01.06.1.01.02			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro				385.000.000		
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan	Laporan	4	385.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	%	90	3.336.130.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						3.336.130.000		
						Efektivitas kerjasama daerah	%	95	1.201.450.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03.1.03		Fasilitasi Kerjasama Daerah					1.201.450.000		
						Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	%	95	571.450.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03.1.03.01			Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah				571.450.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan APPSI dan FKD MPU	Laporan	1	310.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah	Laporan	14	261.450.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti	%	95	250.000.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03.1.03.02			Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta				250.000.000		
						Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Dokumen	15	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi atas evaluasi kerjasama daerah	%	95	380.000.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03.1.03.03			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				380.000.000		
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pemerintahan	Laporan	4	125.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Laporan	4	120.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri	%	100	135.000.000	Biro Pemotdaker	OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	90	970.790.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan					970.790.000		
						Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Dokumen	10	970.790.000		
		4.01.03.1.01.01			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				550.000.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kebijakan pemerintahan dan LKPJ	Laporan	4	550.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.02			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum				225.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan	4	225.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
		4.01.03.1.01.03			Fasilitasi Penataan Wilayah				195.790.000		
						Jumlah Fasilitasi Penataan Wilayah	Laporan	4	195.790.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	95	1.163.890.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03.1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah					1.163.890.000		
						Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Dokumen	3	223.890.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.03.1.02.02			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan				223.890.000		
						Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Laporan	4	223.890.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	%	95	640.000.000	Biro Pemotdaker	
		4.01.03.1.02.01			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				640.000.000		
						Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan DPRD	Dokumen	35	640.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	300.000.000		
		4.01.03.1.02.03			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan				300.000.000		
						Jumlah dokumen Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen	39	300.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	96	1.894.000.000	Biro Hukum	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1.894.000.000		
						Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	100	1.149.000.000	Biro Hukum	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					1.149.000.000		
						Jumlah dokumen kajian produk hukum	Dokumen	12	437.000.000		
		4.01.05.1.01.03			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya				437.000.000		
						Jumlah dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	242.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pengkajian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Laporan	12	195.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Keputusan Gubernur	Dokumen	12	110.000.000		
		4.01.05.1.01.02			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan				110.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	110.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	12	602.000.000		
		4.01.05.1.01.01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan				602.000.000		
						Jumlah Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Laporan	12	178.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	Raperda	15	424.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%	100	745.000.000	Biro Hukum	
		4.01.05.1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan					745.000.000		
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	745.000.000		
		4.01.05.1.01.04			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota				745.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I	Dokumen	95	265.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II	Dokumen	100	250.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III	Dokumen	100	230.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%	96	1.290.000.000	Biro Hukum	
		4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						1.290.000.000		
						Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%	100	965.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					965.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Penanganan Perkara	Dokumen	12	965.000.000		
		4.01.05.1.02.01			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum				965.000.000		
						Jumlah Fasilitasi penanganan Perkara	Perkara	10	465.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Perkara	200	500.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	96	325.000.000	Biro Hukum	
		4.01.05.1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum					325.000.000		
						Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	12	325.000.000		
		4.01.05.1.02.02			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM				325.000.000		
						Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota	Kabupaten/Kota	35	135.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Sengketa	7	190.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%	45	436.834.725.000	Biro Hukum	
		4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						436.834.725.000		
						Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	42	436.834.725.000	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		4.01.04.1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual					436.834.725.000		
						Jumlah Dokumen evaluasi yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen	3	434.146.850.000		
		4.01.04.1.01.01			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual				434.146.850.000		
						Jumlah fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana keagamaan	Kegiatan	3	434.146.850.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								Target	Rp		
(1)	(3)	(5)	(6)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan pelayanan keagamaan	Dokumen	3	2.687.875.000		
		4.01.04.1.01.02			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual				2.687.875.000		
						Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Kegiatan	1	1.000.000.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
						Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan	Kegiatan	10	1.687.875.000		OPD Provinsi ; JAWA TENGAH
JUMLAH									**661.843.692.000**		

BAB V
PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan rangkaian proses perencanaan tahun kelima pencapaian Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, penjabaran RKPD tahun 2023, dan pelaksanaan tahun kelima RPJMD Tahun 2018-2023. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 mengikuti prinsip *money follows program* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan kebermanfaatan langsung kepada masyarakat secara adil dan merata.

Renja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dijabarkan ke dalam RKA sebagai perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih detail pada perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan untuk memperjelas tahapan pelaksanaan dan menjamin pencapaian target–target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran menjadi hal yang penting agar target-target pembangunan dapat tercapai secara efektif dan akuntabel. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran. Pencapaian target-target kinerja tahun 2023 diharapkan mampu menuntaskan target akhir Renstra dan RPJMD 2018 – 2023.